

PELETAK DASAR PENGEMBANGAN SDM KEBUDAYAAN YANG TERSTRUKTUR, TERSTANDAR DAN TERUKUR TIGA TAHUN PUSBANG SDM KEBUDAYAAN (2012-2014)

Direktorat
Kebudayaan



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan

2014

353.3

PEL
P

**PELETAK DASAR
PENGEMBANGAN SDM KEBUDAYAAN
YANG TERSTRUKTUR, TERSTANDAR, DAN TERUKUR**
Tiga Tahun Pusbang SDM Kebudayaan (2012-2014)

PELETAK DASAR PENGEMBANGAN SDM KEBUDAYAAN YANG TERSTRUKTUR, TERSTANDAR, DAN TERUKUR Tiga Tahun Pusbang SDM Kebudayaan (2012-2014)

Pengarah
Drs. Shabri Aliaman

Tim Penulis
Drs. Budiharja, MM
M.Sanggupri, M. Hum
Helena Listyaningtyas, SH
Drs. Saiful Anam, M.Pd
Ir. Dipo Handoko
Mukti Ali, S.Pd
Rauhanda Riyantama, S.S

Desain dan Tata Letak
Dipo Handoko

Cetakan I, Desember 2014

ISBN: 978-602-0999-19-7

Diterbitkan oleh:
Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan
Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2014

SAMBUTAN	<input checked="" type="checkbox"/>
PENGANTAR	<input checked="" type="checkbox"/>
DAFTAR ISI	<input checked="" type="checkbox"/>

SAMBUTAN

Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.
Kepala Badan PSDMPK-PMP

Saya menyambut baik penerbitan buku berjudul "Peletak Dasar Pengembangan SDM Kebudayaan yang Terstruktur, Terstandar, dan Terukur Tiga Tahun Pusbang SDM Kebudayaan (2012-2014)." Buku ini merekam perjalanan Pusbang SDM Kebudayaan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sejak didirikan tahun 2012 hingga tahun 2014.

Sejenak kita tarik mundur ke belakang, dibentuknya Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan (BPSDMPK-PMP) menegaskan bahwa unit utama ini bertanggung jawab pada pengembangan dua kelompok SDM yang dianggap potensial menentukan nasib negeri ini, yakni SDM pendidikan dan SDM kebudayaan.

Kita juga perlu menyimak kembali integrasi pendidikan dan kebudayaan bahwa kelompok manusia paripurna di penghujung hidupnya adalah ingin menjadi manusia berbudaya. Bagaimana melahirkan manusia berbudaya, dibutuhkanlah integrasi antara SDM pendidikan dan SDM berbudaya.

SDM pendidikan itu sudah jelas, di dalamnya ada dosen, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Untuk mendorong kemajuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak cukup SDM pendidikan saja. Kita harus *flashback* ke belakang, ketika ada pendidikan dan kebudayaan, sudah semestinya SDM kebudayaan juga ada di dalamnya. Karena itulah Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan ini dibentuk.

SDM kebudayaan luar biasa luas karakteristiknya. Saya mengapresiasi Pusbang SDM Kebudayaan, yang telah melakukan langkah awal yang sangat penting, yakni mengkategorisasi SDM kebudayaan. Kegiatan pendataan SDM kebudayaan menjadi langkah berikutnya, yang hasilnya menjadi dasar ditetapkannya prioritas pembinaan dan pengembangan secara bertahap.

Permasalahan umum SDM kebudayaan yang lebih diprioritaskan adalah kompetensi, pembinaan, dan pemberdayaan. Artinya, program pengembangan SDM kebudayaan yang utama haruslah membenahi aspek relevansi dari kompetensi SDM kebudayaan. Barulah setelah itu dilakukan program pembinaan yang tersistem dan terstandar, serta dilanjutkan program pemberdayaan SDM kebudayaan, khususnya dalam mendukung pembelajaran di satuan pendidikan.

Berkaitan dengan pembelajaran di sekolah, Pusbang SDM Kebudayaan punya tugas mengeksplorasi budaya, sehingga tercipta pembelajaran berbasis budaya. Kita harus menafsir ulang, memunculkan kembali nilai-nilai yang ada pada karya dan koleksi budaya. Selanjutnya, Pusbang SDM Kebudayaan menyampaikan kepada para guru agar nilai-nilai tersebut diintegrasikan pada seluruh mata pelajaran dalam proses pembelajaran.

Semua guru harus memahami eksplorasi budaya, khususnya budaya setempat. Sehingga ujung dari pendidikan di sekolah adalah budaya menjadi tradisi. Itulah esensi disatukannya pendidikan dan kebudayaan. Seluruh produk pendidikan harus membuat orang berbudaya. Kehidupan tertinggi di dunia adalah manusi yang berbudaya, bangsa yang berperadaban.

Mengenai sertifikasi SDM kebudayaan, sebagaimana dituntut pada SDM pendidikan, tidak bisa serta merta dilakukan karena harus ada dahulu regulasinya. Sebelum ada regulasi mengenai sertifikasi SDM kebudayaan, yang paling penting dilakukan adalah membangun semangat meningkatkan kompetensinya dulu. Aspek kecukupan dan kesesuaian kompetensi itulah yang harus diberikan dulu kepada SDM kebudayaan.

Saya berharap penerbitan buku ini bukan hanya menjadi penanda keberadaan Pusbang SDM Kebudayaan yang memasuki tahun ketiga. Namun juga menjadi dokumentasi penting kiprah, peran, capaian kinerja sebagai pendorong langkah-langkah berikutnya di tahun-tahun mendatang dalam rangka menghasilkan manusia Indonesia yang berbudaya dan beradab.

Jakarta, Desember 2014
Kepala BPSDMPK-PMP



Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.
NIP 196202031987031002

PENGANTAR

Drs. Shabri Aliaman
Kepala Pusbang SDM Kebudayaan

Alhamdulillah rabbil 'aalamin. Puji syukur senantiasa saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala karunia-Nya. Hingga berakhirnya tahun 2014 ini, Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan (Pusbang SDM Kebudayaan), Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memasuki tahun ketiga. Bukan hal berlebihan jika kami menandai perjalanan sejarah dan kiprah Pusbang SDM Kebudayaan, unit kerja yang mengemban tugas dan fungsi pengembangan SDM kebudayaan ini, dengan sebuah buku berjudul "Peletak Dasar Pengembangan SDM Kebudayaan yang Terstruktur, Terstandar, dan Terukur Tiga Tahun Pusbang SDM Kebudayaan (2012-2014).

Buku ini merekam perjalanan Pusbang SDM Kebudayaan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sepanjang tahun 2012-2014. Buku ini terdiri atas enam bab. Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan secara singkat dinamika kelembagaan fungsi kebudayaan di masa awal kemerdekaan hingga integrasi pendidikan dan kebudayaan di era Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012. Bab 2 memaparkan urgensi keberadaan Pusbang SDM Kebudayaan

menjadi sangat strategis mengingat penyiapan SDM kebudayaan, dan juga menyiapkan SDM pendidikan, sangat potensial dalam melahirkan SDM yang menjadi penentu masa depan negeri ini. Bab 3 menjelaskan dinamika Pusbang SDM Kebudayaan dalam menapaki masa-masa awal dalam kondisi kantor, sarana dan prasarana yang sederhana dan terbatas, serta dukungan pegawai yang masih belum optimal.

Bab 4 memaparkan ragam SDM kebudayaan. Kami telah melakukan inventarisasi ragam dan jenis SDM kebudayaan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pendataan SDM kebudayaan, baik yang berstatus aparatur maupun yang berada di masyarakat. Bab 5 mengupas capaian kinerja Pusbang SDM Kebudayaan. Setidaknya ada tiga terobosan utama yang sudah kami lakukan. Pertama, penyusunan regulasi dengan ditetapkannya Permendikbud Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan SDM Kebudayaan. Kedua, pendataan SDM kebudayaan yang mencakup 5325 orang SDM kebudayaan aparatur yang berada di 52 satuan kerja pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 3.181 orang SDM kebudayaan aparatur di 84 SKPD/UPTD, serta 10.392 orang SDM kebudayaan di masyarakat di Provinsi Banten, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat, per tanggal 30 November 2014. Ketiga, peningkatan kompetensi SDM kebudayaan yang sudah menyentuh 2.491 orang atau 13,2% dari jumlah SDM kebudayaan yang sudah kami data.

Bab 6 berupa testimoni dari sejumlah pihak dari berbagai kalangan yang pekerjaan dan profesinya erat dengan dunia kebudayaan. Di antaranya dari mantan pejabat, akademisi, pelaku budaya, seniman, guru dan pengelola museum.

Perlu saya sampaikan bahwa Pusbang SDM Kebudayaan merupakan unit kerja eselon II yang dibentuk pada 27 Januari 2012, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pusbang SDM Kebudayaan menggulirkan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas SDM kebudayaan

PENGANTAR

untuk mendukung keberhasilan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Pusbang SDM Kebudayaan telah dan terus berupaya mengembangkan SDM kebudayaan dengan tata nilai yang terstruktur, terstandar, dan terukur.

Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Kepala BPSDMPK-PMP, dan Bapak Dirjen Kebudayaan yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan dalam pelaksanaan pengembangan SDM kebudayaan.

Dari lubuk hati paling dalam, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh staf dan pegawai di lingkungan Pusbang SDM Kebudayaan, khususnya para pejabat eselon III dan IV, mitra kerja terdekat saya, yang telah dapat bekerja sama dengan baik, sehingga benar-benar telah mendukung pencapaian kinerja yang menjadi tugas dan fungsi.

Semoga potret perjalanan dan kiprah Pusbang SDM Kebudayaan ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengembangkan SDM kebudayaan yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2014
Kepala Pusbang SDM Kebudayaan



Drs. Shabri Aliaman
NIP 195705051984031019

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iv
PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PUSAT PENGEMBANGAN SDM KEBUDAYAAN	15
BAB 3 MENAPAK DI AWAL INTEGRASI	31
BAB 4 RAGAM SDM KEBUDAYAAN	47
BAB 5 CAPAIAN KINERJA 2012-2014	61
BAB 6 TESTIMONI DAN RAGAM DATA	97



BAB 1

PENDAHULUAN

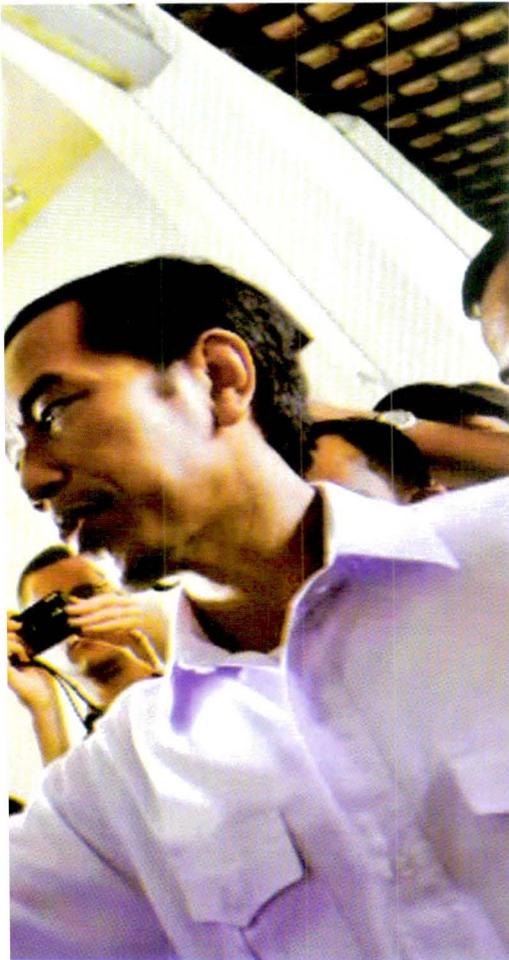
■ Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Museum Kebangkitan Bangsa, Jakarta. Foto diambil pada Maret 2014, sebelum Jokowi menjabat Presiden RI.



Antara Foto

BAB 1

P E N D A H U L U A N



Sejarah mencatat, mulai awal rancangan UUD 1945 dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah disetujui pasal khusus yang memuat bidang kebudayaan dalam UUD. Sebelum Pasal 32 diterima secara aklamasi berdampingan dengan Pasal 31 tentang pendidikan di bawah naungan Bab XIII Pendidikan, pasal tentang kebudayaan sempat berpindah-pindah urutan.

Pada tanggal 13 Juli 1945, bahasan kebudayaan semula ditampung dalam Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi: “Pemerintah harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan bagi itu memajukan kebudayaan dari setiap daerah, sebagai rukun dari kebudayaan nasional itu.” Pada

sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, posisi kebudayaan bergeser lagi ke Pasal 33 di bawah bab "Kesejahteraan Sosial". Ketika digeser ke Pasal 33 ini, rumusannya dipersingkat menjadi "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Menurut penilaian Mohammad Hatta, pasal tentang kebudayaan tidak tepat ditempatkan di bawah Bab Kesejahteraan Sosial. Hatta mengusulkan pasal kebudayaan dipindahkan ke dalam Bab Pendidikan.

Rumusan pasal tentang kebudayaan dalam UUD 1945 itu merupakan bagian penting sejarah yang dirangkum oleh Nunus Supardi, mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan (1993-1999), dalam buku karyanya berjudul *Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah dari Masa ke Masa* (2013). "Usul Bung Hatta yang kemudian disahkan sebagai rumusan UUD 1945 itu mencerminkan pandangan Bung Hatta tentang kedekatan hubungan antara pendidikan dan kebudayaan. Keduanya saling membutuhkan dan saling mengisi," kata Nunus Supardi, yang menjabat Wakil Ketua Lembaga Sensor Film sejak 2009.

Materi yang diberikan kepada peserta didik, kata Nunus, pada hakikatnya adalah kebudayaan sehingga pendidikan dan pengajaran merupakan proses pembudayaan. Sebaliknya bagi bidang kebudayaan melalui kegiatan pengajaran dan pendidikan, kebudayaan dapat ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya. "Dengan cara demikian kebudayaan bangsa akan lestari, tidak terlepas dari akarnya, didukung oleh pemilik kebudayaan yang terdidik dan dengan demikian memiliki ketahanan budaya yang tangguh," kata Nunus.

Nunus mencatat, hubungan kebudayaan dan pendidikan juga disampaikan Ki Hadjar Dewantara, yang menyatakan, "Kebudayaan sebagai bentuk kemampuan manusia untuk menggampangkan hidupnya dan memperbesar hasil hidupnya, berarti manusia harus meninggikan pikiran, rasa, dan kemauannya. Hal itu dapat dicapai melalui usaha pendidikan."



Dok. Pusbang SDM Kebudayaan

- Pertunjukan seni tari Golek Ayun-Ayun pada penutupan Raker dan Koordinasi Pengembangan SDM Kebudayaan, di Yogyakarta.

Nunus menyimpulkan bahwa sejak awal penyusunan rancangan UUD 1945, para pendiri bangsa telah memosisikan Pemerintah, Negara, atau Penguasa sebagai elemen yang diberi amanat untuk: 1) memajukan kebudayaan nasional Indonesia; 2) menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan 3) menghormati dan memelihara bahasa. “Atas dasar itulah di dalam organisasi pemerintah RI dibentuk kelembagaan kebudayaan,” kata Nunus, yang juga pernah menjabat Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (5 Februari—14 November 2001).

Buku *Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah dari Masa ke Masa* (2013), memilah kelembagaan kebudayaan menjadi empat bagian: masa pra-kemerdekaan, awal kemerdekaan (1945-1967), masa pembangunan (1967-1998), dan masa reformasi (1998-sekarang). Lembaga kebudayaan era pra-kemerdekaan bisa dibedakan pada masa kerajaan dan masa penjajahan.

Berdasarkan sejumlah penelitian, di antaranya, penelitian disertasi Prof. Dr. Edi Sedyawati, disertasi Ferdinandus, Dwi Cahyono, semua menunjukkan pada masa pemerintahan kerajaan ada embrio lembaga yang mengurus kebudayaan, kurang lebih sejak masa abad IX sampai XVI. Prof. Dr. Edi Sedyawati dalam bukunya berjudul *Pengarcnaan Ganeca Msa Kadiri dan Singasari Suatu Tinjauan Sejarah Kesenian*, menyatakan bahwa dalam kapasitasnya sebagai pemimpin budaya, raja melakukan pengaturan terhadap segala macam aktivitas yang berkenaan dengan keindahan. Pengaturan itu, antara lain, mengangkat pejabat mulai dari tingkat pusat hingga desa. Para pejabat tersebut merupakan perangkat teknis sekaligus sebagai perluasan atau kepanjangan kekuasaan raja dalam bidang tertentu. Raja juga mengeluarkan kebijakan pemeliharaan dan perlindungan terhadap kesenian, pementasan seni, semacam "festival" seni untuk menghibur rakyat yang berlangsung hingga beberapa lama. Buku ini juga menguraikan jabatan



- Festival Teluk Jailolo yang diadakan setiap tahun, merupakan bagian dari pengembangan kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Maluku Utara, yang pada masa silam merupakan wilayah Kesultanan Tidore, Ternate, Bacan dan Jailolo.



Dok. Museum Nasional

- Pemandu Museum Nasional memberikan penjelasan kepada siswa-siswa. Cikal bakal Museum Nasional adalah *Bataviaach Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW)* yang didirikan Belanda.

di bidang kebudayaan dan lebih diarahkan pada pemerintahan desa.

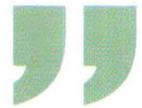
Pada kasultanan di Maluku Utara, yakni Kasultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo, menyatakan diri menjadi pusat pengembangan kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai adat warisan nenek moyang yang telah memudar diakui sangat penting dihidupkan kembali untuk mempererat persatuan di Maluku Utara. Keberadaan Kasultanan sebagai pusat pengembangan kebudayaan mengukuhkan jati diri masyarakat kasultanan.

Di masa penjajahan, lembaga kebudayaan kebanyakan didirikan oleh masyarakat dan berstatus partikelir atau swasta. Setidaknya ada sembilan kelompok, yakni lembaga kebudayaan, kesenian, perfilman, kepurbakalaan,

permuseuman, kebahasaan, perbukuan, kearsipan, dan perpustakaan. Ketika Indonesia merdeka, lembaga-lembaga kebudayaan tersebut tetap dijalankan oleh orang-orang Belanda. "Orang kebudayaan bersanding dengan damai dan bekerja bersama. Kebudayaan tidak ada peperangan. Bahkan ketika Kongres Kebudayaan 1918, ada lima utusan warga Belanda yang mengusulkan perlunya bahasa *lingua franca*, bahasa pergaulan, yang kemudian tercetuslah bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 1928," kata Nunus.

Di era awal kemerdekaan, susunan kabinet pertama yang dibentuk dua hari setelah kemerdekaan, yakni 19 Agustus 1945, nomenklatur

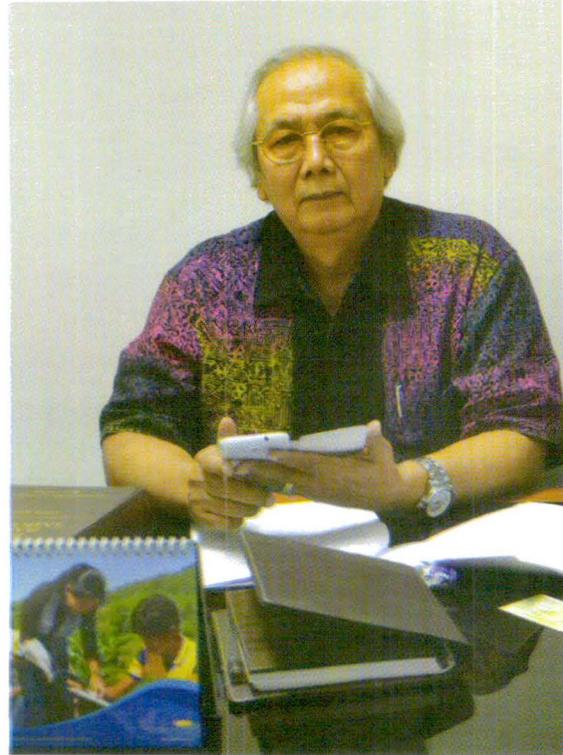
"NOMENKLATUR
KEBUDAYAAN BARU
TEGAS DINYATAKAN
PADA KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, PENGAJARAN,
DAN KEBUDAYAAN
(KEMENTERIAN PP DAN K)
PADA KABINET HATTA I..."



kebudayaan ada di bawah payung Kementerian Pengajaran. Nomenklatur kebudayaan baru tegas dinyatakan pada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (Kementerian PP dan K) pada Kabinet Hatta I pada 29 Januari 1948, yang berlaku hingga tanggal 6 Maret 1962. "Pada masa awal kemerdekaan, kebudayaan diurus oleh Bagian Kebudayaan, kemudian berubah menjadi Bagian D pada Kementerian," kata Nunus.

Bagian Kebudayaan bertugas mencetak kader formal. "Ketika itu belum ada orang kebudayaan, berupa ahli terdidik, dan berpengalaman. Kecuali orang yang sempat diangkat pegawai lembaga kebudayaan yang dibentuk Belanda. Misalnya *Bataviaach Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (BGKW), yang merupakan cikal bakal Museum Nasional. Pemerintah Belanda pelit mengangkat SDM dari Indonesia," kata Nunus.

Mulai tahun 1950, dikenal nomenklatur lembaga bernama Jawatan Kebudayaan. "Meski namanya Jawatan Kebudayaan, namun tugasnya hanya mendidik guru-guru kesenian. Kementerian belum memikirkan SDM museum, arkeologi, kebahasaan, dan bidang budaya lainnya," kata Nunus. Meski begitu, di daerah-daerah telah didirikan Perwakilan



■ Nunus Supardi, mantan Sekretaris Dirjen Kebudayaan (1993-1999) dan Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (5 Februari-14 November 2001)

Jawatan Kebudayaan di Medan, Bukittinggi, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan Ambon.

Pada 6 Maret 1962, Kabinet Kerja III mengubah nomenklatur menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika itu pendidikan tinggi juga menjadi kementerian tersendiri, yakni Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. "Di masa awal kemerdekaan ini penataan kelembagaan bidang kebudayaan masih sederhana dan mencari bentuk. Pada tahun 1951, masalah kebudayaan dibahas khusus dalam Kongres Kebudayaan 1951, sebagai kelanjutan Kongres Kebudayaan 1948," kata Nunus.



Pada tahun 1964, sudah dikenal istilah Direktorat Kebudayaan untuk menggantikan Jawatan Kebudayaan. Nama direktorat lainnya adalah Direktorat Pendidikan Umum, Direktorat Pendidikan Kejuruan, dan Direktorat Pendidikan Masyarakat. Nomenklatur kementerian berubah lagi menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Dwikora III, mulai 25 Juli 1966. Direktorat Kebudayaan diubah menjadi Direktorat Jenderal Kebudayaan, "Dirjen Kebudayaan pertama adalah Indrosoegondo sampai 1 Juni 1968. Sebagai dirjen pertama, beliau berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar posisi kebudayaan dalam pemerintahan, terutama dalam hal menata kelembagaan. Selain itu juga ditugasi membersihkan personalia dari unsur sosialis-komunis," kata Nunus.

"PADA TAHUN 1964,
SUDAH DIKENAL
ISTILAH DIREKTORAT
KEBUDAYAAN UNTUK
MENGGANTIKAN
JAWATAN KEBUDAYAAN.
DIREKTORAT
KEBUDAYAAN
DIUBAH MENJADI
DIREKTORAT JENDERAL
KEBUDAYAAN PADA
TAHUN 1966..



Susunan organisasi Ditjen Kebudayaan ketika itu terdiri dari Sekretariat Ditjen Kebudayaan, Direktorat Kesenian, Direktorat Pendidikan Kesenian, Direktorat Museum, dan Direktorat Bahasa dan Kesusastraan. Nunus juga mencatat, Dirjen Kebudayaan Indrosoegondo juga berperan dalam mengganti pola pikir (*mindset*) masyarakat tentang kebudayaan, terutama berkaitan dengan masalah hubungan antara kebudayaan dan ideologi politik. Tugas berat Ditjen Kebudayaan kala itu adalah mendorong perubahan iklim politik dari pola pikir kebudayaan yang berorientasi pada ideologi partai politik menjadi kebudayaan

berorientasi netral dan humanis-universal, yang menurut Harimurti Kridalaksana, "Pemerintah perlu melaksanakan program rehabilitasi kebudayaan."

Pada era Ditjen Kebudayaan pertama ini, kegiatan kebudayaan belum dapat berjalan baik. Penyebabnya adalah masalah internal kelembagaan, kurangnya pendanaan, sarana dan fasilitas. Kegiatan yang diselenggarakan adalah penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia (1966) dan merumuskan konsep baru tentang kebudayaan. Kegiatannya berupa Simposium Bahasa dan Kesusastraan Indonesia.

Pada tahun 1968, ketika Dirjen Kebudayaan dijabat Prof. Dr. Ida Bagus Mantra (1968-1978). "Beliau adalah peletak dasar pembangunan kebudayaan, termasuk **pembangunan SDM kebudayaan**. Ketika itu sudah mulai ada penataran, bimbingan dan penyuluhan, yang dilakukan oleh Bagian Kepegawaian Setditjen," kata Nunus, yang mengawali karier sebagai staf Bagian Perencanaan Ditjen Kebudayaan.

Pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Daoed Joesoef (1978-1988), terlontar pandangan baru yang menyatakan bahwa pendidikan adalah bagian dari kebudayaan, yang dapat diartikan sebagai sebuah koreksi terhadap pemosisian hubungan antara bidang kebudayaan dan pendidikan, dan sebaliknya. "Bapak Daoed Joesoef berusaha meletakkan posisi kebudayaan

DIRJEN KEBUDAYAAN
PROF. DR. IDA BAGUS
MANTARA (1968-1978)
ADALAH PELETAK
DASAR PEMBANGUNAN
KEBUDAYAAN,
TERMASUK
PEMBANGUNAN SDM
KEBUDAYAAN.





Dok. Pusbang SDM Kebudayaan

secara benar, bukan sebaliknya secara tidak disadari telah menempatkan bidang kebudayaan sebagai subordinat bidang pendidikan,” kata Nunus, yang dipercaya menjabat Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Kebudayaan (1985-1993).

“Saya sejak di Bagian Perencanaan Setditjen Kebudayaan sudah pernah mengusulkan adanya semacam Pusdiklat untuk SDM bidang kebudayaan. Sekarang ini, Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan mestinya juga didukung oleh Pusdiklat untuk SDM Kebudayaan,” kata Nunus, yang pernah menjabat Sekretaris Ditjen Kebudayaan (1993-1999).

“TENAGA KEBUDAYAAN
BUKAN HANYA YANG
BERADA DI BELAKANG
MEJA, MELAINKAN JUGA
MASYARAKAT BUDAYA DI
MASYARAKAT, NUN JAUH
DI PELOSOK NEGERI...



Menurut Nunus, tenaga kebudayaan yang jumlahnya terbatas, bukan hanya yang berada di belakang meja. Melainkan juga masyarakat budaya di masyarakat, nun jauh di pelosok negeri. “Yang perlu dikembangkan adalah lembaga kebudayaan yang ada di masyarakat. Yang sudah mapan, memiliki badan hukum, pengurus, program, SDM harus semakin dimajukan. Sedangkan lembaga kebudayaan tingkat menengah dan bawah harus pelan-pelan dimajukan,” kata Nunus. ■

BAB 2

PUSAT PENGEMBANGAN SDM KEBUDAYAAN



BAB 2

PUSAT PENGEMBANGAN SDM KEBUDAYAAN

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, atau disingkat Pusbang SDM Kebudayaan, memang baru seumur jagung. Pusbang SDM Kebudayaan baru didirikan pada awal 2012. Terbentuknya Pusbang SDM Kebudayaan merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi Internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Nomenklatur kebudayaan masuk ke dalam Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Perpres tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



■ Drs. Shabri Aliaman dilantik sebagai Kepala Pusbang SDM Kebudayaan yang pertama, pada 30 Maret 2012.

Pasal 879-890 Permendikbud mengatur ketentuan keberadaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan (Pusbang SDM Kebudayaan), yang bernaung di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP). Keberadaannya untuk mendukung pengembangan kebudayaan. Drs. Shabri Aliaman dipercaya sebagai Kepala Pusbang SDM Kebudayaan. Shabri dibantu M. Sanggupri, M.Hum, Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi dan Drs. Budiharja, MM, Kepala Bidang Sertifikasi.



Drs. Shabri Aliaman
Kepala Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan



M. Sanggupri, M.Hum
Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi



Dra. Puspa Dewi
Kasubbid Program



Aryanti Budhiastuti, SH
Kasubbid Evaluasi

**Kelompok Jabatan
Fungsional (Widyaiswara)
(Pasal 907)**



Helena Listyaningtyas, SH
Kepala Subbagian Tata Usaha



Drs. Budiharja, MM
Kepala Bidang Sertifikasi



Andi Syamsu Rijal, SS., M.Hum
Kasubbid Program



Dra. Dahlia Silvana Anekawati
Kasubbid Evaluasi

A. URGENSI PUSBANG SDM KEBUDAYAAN

Pembentukan Pusbang SDM Kebudayaan, menurut Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., Kepala BPSDMPK-PMP, menjadi bentuk penguatan integrasi antara pendidikan dan kebudayaan. BPSDMPK-PMP sendiri memiliki tugas tak ringan, yakni menyiapkan SDM pendidikan dan SDM kebudayaan. "Dua kelompok SDM tersebut dianggap sangat potensial menentukan masa depan nasib negeri ini," kata mantan Rektor Universitas Negeri Medan ini.

Menurut Syawal, komposisi manusia paripurna, atau di ujung masa hidupnya, adalah ingin menjadi manusia berbudaya. Kemajuan produk-produk teknologi juga menjadi bagian dari budaya. "Jadi karena itulah antara pendidikan dan kebudayaan harus berintegrasi. Untuk itu harus disiapkan SDM pendidikan dan SDM kebudayaan yang handal," katanya.

Pusbang SDM Kebudayaan harus mampu menyusun daftar karakteristik jenis-jenis SDM kebudayaan. Syawal mencermati, setidaknya terdapat tiga persoalan menyangkut SDM kebudayaan yang harus dituntaskan. *Pertama*, menyangkut kompetensi. Pusbang SDM Kebudayaan harus mampu membuat peta kompetensi dari semua jenis, identitas karakteristik SDM kebudayaan yang telah terdata. *Kedua*, pembinaan yang harus dilakukan sesuai dengan

"PEMBENTUKAN
SDM KEBUDAYAAN
MENJADI BENTUK
PENGUATAN INTEGRASI
ANTARA PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN, DI
ANTARANYA BERTUGAS
MENYIAPKAN SDM
PENDIDIKAN DAN
SDM KEBUDAYAAN.
DUA KELOMPOK
SDM TERSEBUT
SANGAT POTENSIAL
MENENTUKAN MASA
DEPAN NASIB NEGERI
INI.."

Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd
Kepala BPSDMPK-PMP



MS Harris

peta kompetensi tiap jenis SDM kebudayaan dan harus tersistem. *Ketiga*, mengenai pemberdayaan yang harus dikaitkan dengan pendidikan. Sejauh ini menurut Syawal belum terjadi pemberdayaan SDM kebudayaan secara optimal terhadap sistem persekolahan.

"Pembentukan Pusbang SDM Kebudayaan ini kami pandang sangat bagus. Saya merasa mendapat tantangan berat karena ini benar-benar baru. Selama ini SDM kebudayaan belum diurus secara khusus oleh lembaga yang khusus juga. Meski berat, saya yakin jajaran Pusbang SDM Kebudayaan sangat optimistis mampu menjalankan amanah dengan baik," ujar Syawal.

Tujuan strategis pengembangan SDM kebudayaan yang sudah dirumuskan ada dua hal, yakni meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM kebudayaan dan meningkatkan apresiasi terhadap SDM kebudayaan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusbang SDM Kebudayaan memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengembangan sumber daya manusia kebudayaan.



Mukti Ali

Fungsi Pusbang SDM Kebudayaan adalah:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia kebudayaan;
- b. Penyusunan program pengembangan sumber daya manusia kebudayaan;
- c. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan;
- d. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan;

- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kebudayaan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi pusat pengembangan sumber daya manusia kebudayaan.

Untuk menggerakkan kebijakan, program dan kegiatan Pusbang SDM Kebudayaan didukung Bidang Peningkatan Kompetensi, Bidang Sertifikasi, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan program peningkatan kompetensi serta koordinasi, fasilitasi, pemantauan,



evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kebudayaan.

Bidang Peningkatan Kompetensi menjalankan fungsi meliputi: penyusunan bahan kebijakan teknis bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia kebudayaan; penyusunan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia kebudayaan; penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kebudayaan; fasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kebudayaan; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kebudayaan; dan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kebudayaan.

Bidang Peningkatan Kompetensi didukung Subbidang Program dan Subbidang Evaluasi. Tugas Subbidang Program adalah melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis dan program peningkatan kompetensi serta bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kebudayaan. Sedangkan tugas Subbidang Evaluasi melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan-an kompetensi sumber daya manusia kebudayaan.

Bidang Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan program sertifikasi serta bahan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan. Bidang ini menjalankan fungsi untuk: penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan; penyusunan program sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan; penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan; fasilitasi pelaksanaan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan; dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan.

Bidang Sertifikasi juga didukung Subbidang Program dan Subbidang Evaluasi. Tugas Subbidang Program Bidang Sertifikasi adalah melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis dan program sertifikasi serta bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan. Sedangkan tugas Subbidang Evaluasi Bidang Sertifikasi adalah melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, persuratan dan kearsipan, kerumahtanggaan, dan ketatalaksanaan Pusat. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.





Rauhanda Riyantama

C. VISI DAN MISI PUSBANG SDM KEBUDAYAAN

Di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, arah kebijakan Kementerian harus mengacu visi misi Pemerintah RI. Pusbang SDM Kebudayaan siap mendukung visi Pemerintah, yakni "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Misi Pemerintah RI, yakni:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. ■



BAB 3
MENAPAK DI AWAL
INTEGRASI

BAB 3

MENAPAK DI AWAL INTEGRASI

Institusi baru tak mesti mendapatkan “keistimewaan” kantor baru. Setidaknya hal itu dialami Pusbang SDM Kebudayaan, satuan kerja baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di awal berdirinya, kantor Pusbang SDM Kebudayaan berbagi tempat dengan kantor Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, yakni di Gedung E Lantai 8, Kompleks Kemdikbud, Senayan, Jakarta. Sebelum fungsi kebudayaan terintegrasi dengan Kemdikbud, kantor Pusbang SDM Kebudayaan itu ditempati Direktorat Nilai Sejarah, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Di awal berdirinya, kantor Pusbang SDM Kebudayaan masih sangat sederhana dengan SDM yang tak lebih dari 33 orang. Bagi Shabri Aliaman, Gedung E Lantai 8 bukan tempat baru. Sejak 2008, Shabri mengemban amanah sebagai Direktur Nilai Sejarah



- Suasana kantor di Gedung E lantai 6 yang sedang dirapikan untuk ditempati Pusbang SDM Kebudayaan (Desember 2013)

di era Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, yang berkantor di Gedung E Lantai 8.

A. PIMPINAN DAN PENGALAMAN JABATAN

Shabri Aliaman tak pernah menyangka ia mendapat amanah menjadi Kepala Pusbang SDM Kebudayaan. Namun, lelaki berambut perak kelahiran Tapaktuan, Aceh Selatan, 5 Mei 1957 itu tak pernah ragu menjalankan amanah tersebut. Meskipun Pusbang SDM Kebudayaan merupakan institusi yang benar-benar baru. Ketika ia dilantik pada 30 Maret 2012, ia juga belum memiliki

kantor representatif dan para pimpinan dan staf.

Pengalaman berkecimpung dan memimpin lembaga kebudayaan, khususnya bidang sejarah, dijadikan modal Shabri Aliaman menggerakkan Pusbang SDM Kebudayaan. "Terus terang ini tantangan besar bagi saya, tapi kami harus optimistis bisa menjalankan amanah itu sebaik-baiknya," katanya.

Shabri mengawali karier sebagai PNS pada Sub-Bagian Penggandaan dan Pengembangan Pegawai pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (sekarang Dinas Pendidikan Provinsi Aceh). Suami dari Setiawati, SH, MH, aparatur pada Kementerian PAN-RB ini sebenarnya tidak pernah bermimpi bekerja jauh dari kampung halamannya Aceh "Serambi Mekkah". Allah SWT mentakdirkan lain, beliau harus menentukan pengabdian selanjutnya di Jakarta. Ayah dari dokter Nadia Shabri, Tania Shabri, alumni Hood College Maryland, Amerika Serikat, dan si bungsu M. Teguh Setiawan Shabri, calon farmakolog dari Universitas Indonesia Jakarta, ini dipercaya mengemban tugas sebagai nakhoda pada satuan kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tekadnya harus bekerja keras, belajar, berdiskusi dan membangun kerjasama dengan semua pihak terkait demi terwujudnya SDM kebudayaan yang berkualitas.

Latar belakang pendidikan sarjana Shabri diraih pada Jurusan Civics Hukum dengan minor Sejarah, Fakultas Keguruan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pengalaman bekerja di bidang sejarah diawali Shabri tahun 1995, ketika bertugas di UPT Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Banda Aceh wilayah kerja Aceh dan Sumatera Utara. Selama dua tahun ia dipercaya menjadi Kepala Sub-Bagian

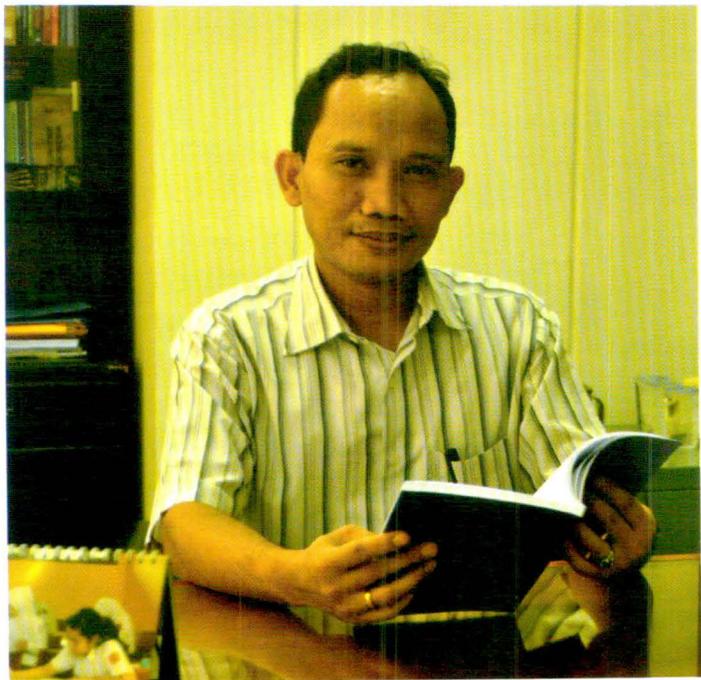


Dok. Pusbang SDM Kebudayaan

Tata Usaha. Kemudian tahun 1998-2008, ia ditugaskan menjadi Kepala BKSNT Banda Aceh, yang nomenklturnya berubah menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT), dan terakhir berubah lagi menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB). Selanjutnya tanggal 6 Maret 2008 ia dilantik menjadi Direktur Nilai Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, hingga terakhir dipercaya sebagai Kepala Pusbang SDM Kebudayaan.

Pejabat yang hingga kini bahu-membahu dengan Shabri adalah para kepala bidang, yakni M. Sanggupri, Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi dan Budiharja, Kepala Bidang Sertifikasi. M. Sanggupri sudah banyak berkecimpung di dunia sejarah bersama Shabri Aliaman. Sebelumnya, Sanggupri, Kepala Seksi Sosialisasi Nilai Sejarah, Subdit Sosialisasi dan Internalisasi Nilai Sejarah, Direktorat Nilai Sejarah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi dibantu dua kepala subbidang, yaitu Kepala Subbid Program Puspa Dewi dan Kepala Subbidang Evaluasi Aryanti Budhiastuti.

Perjalanan karier lelaki berdarah Bugis, yang memegang teguh spirit "tidak akan mungkin lahir pelaut ulung di laut yang tenang", ini memang unik. Lulus dari Jurusan Ilmu



Mukti Ali

Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, lelaki yang akrab disapa Pak Gupri ini justru bergelut dalam bidang sejarah. Tepatnya di tahun 1995, ia mulai mengabdikan sebagai PNS di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

"Awalnya saya ditempatkan sebagai staf di Subdirektorat Sejarah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Pada Direktorat ini saya mengerjakan penulisan sejarah politik, antara lain, Pemikiran Tokoh-tokoh Kebangsaan, Sejarah Politik Kerajaan Tradisional di Nusantara," kata pria kelahiran Kabupaten Wajo pada 2 Mei 1970. Hingga tahun 2000, di era Presiden Abdurrahman Wahid, struktur organisasi Depdikbud berubah dengan dikeluarkannya fungsi kebudayaan dan dimasukkan ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar). Sanggupri termasuk pegawai yang berpindah gerbong ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Selama kurun 1995-2005, Sanggupri mengalami empat kali perubahan struktur organisasi satuan kerja bidang sejarah. Di tahun 2005, ia dimutasi ke Direktorat Nilai Sejarah. Di sinilah awal mula Sanggupri bertemu dengan Drs. Shabri Aliaman, yang kini menjadi Kepala Pusbang SDM Kebudayaan. "Bertemu Pak Shabri itu di Direktorat Nilai Sejarah tahun 2008. Sampai sekarang di Pusbang SDM Kebudayaan, saya masih satu tim kerja dengan beliau," kata pria yang gemar membaca buku ini.

Bagi Sanggupri, kembalinya ke lingkungan Kemdikbud, khususnya di Pusbang SDM Kebudayaan menjadi hal baru yang ia rasakan. Tentu ini menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi. Tugasnya di Pusbang SDM Kebudayaan adalah memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM Kebudayaan, melakukan analisis kebutuhan diklat, kemudian meningkatkan kompetensi mereka melalui berbagai jenis diklat.

Visi di Direktorat Nilai Sejarah di bawah Depbudpar adalah "Meningkatkan Kesadaran Sejarah Masyarakat". Menurut Sanggupri, hal itu amatlah sulit diukur, karena tidak ada standar sasaran yang jelas seperti di Kemdikbud. "Kalau di bawah Kemdikbud visi tersebut jelas sasarannya, yakni peserta didik," kata Sanggupri.

Sedangkan Budiharja, sebelumnya menjabat Kepala Subdit Pemeliharaan, Direktorat Permuseuman (2006-2012). Budiharja dibantu Andi Syamsu Rijal, Kepala Subbidang Program dan Dahlia Silvana Anekawati, Kepala Subbidang Evaluasi. Andi Rijal sebelumnya berasal dari Direktorat Geografi Sejarah, sedangkan Dahlia sebelumnya mengabdikan diri di Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial.

Budiharja memiliki latar belakang kebudayaan yang kental. Lahir di Bantul, Yogyakarta dalam lingkungan keluarga seniman, Budi dikaruniai kemampuan menari. Kemampuannya itu tak lepas dari darah seniman yang diturunkan kedua orangtuanya.

"Kedua orangtua saya itu pelaku dalam wayang orang. Jadi darah senimannya itu juga turun ke saya," kata lelaki kelahiran 12 September 1958 ini. Ayahnya yang lurah Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Bantul, adalah tokoh yang dituakan. Mereka memiliki sanggar budaya yang dikelola masyarakat. Sanggar itu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya melalui SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seiring berjalannya waktu kala Budi harus melanjutkan studi di perguruan tinggi, ia sudah jarang menari lagi. Ia lebih fokus untuk kuliah di Jurusan Arkeologi UGM. Hingga akhirnya Budi sudah tak luwes lagi menari. Secara teori ia masih paham tentang gerakan-gerakannya, namun jika harus menari, ia merasa sudah tak sanggup lagi. Meskipun demikian, ia tetap memiliki perhatian pada dunia tari.

Pengalaman panjang dalam dunia seni dan budaya ini menjadi modal Budiharja untuk menjalankan amanahnya sebagai kepala Bidang Sertifikasi di Pusbang SDM Kebudayaan. Di birokrasi, Budi pernah menjabat pembantu Pimpinan Bidang Museum Sejarah dan Purbakala Kanwil Depdikbud Provinsi D.I. Yogyakarta, Kepala Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta, dan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (sekarang Balai Pelestarian Cagar Budaya) D.I. Yogyakarta.

Di lingkungan birokrasi pusat, Budi pernah menjabat Kasubdit Pemeliharaan dan Perawatan, Dit. Museum, Ditjen. Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.



Mukti Ali



B. PRAHARA BEREPUT PEGAWAI

Langkah pertama yang dilakukan Shabri ketika dilantik menjadi Kepala Pusbang SDM Kebudayaan adalah berkonsultasi dengan Prof. Dr. Wiendu Nuryanti, M.Arch, yang ketika itu menjabat Wakil Mendikbud Bidang Kebudayaan (Wamenbud). Dibantu tim dari Wamenbud, Shabri mulai menyusun program sekaligus para pejabat dan stafnya. Karena ragam SDM kebudayaan yang luas, Shabri berharap mendapatkan para staf dari bidang kebudayaan yang beragam pula.

Setelah berkonsultasi, Shabri mulai menapaki langkah berat berikutnya, mencari pembantu pimpinan dan para stafnya. Bak sebuah prahara dalam drama, Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan

- Suasana kantor lama, Gedung E lantai 8, menjelang dibongkar dan berpindah ke Gedung E lantai 6. (Desember 2013-Januari 2014)



Dok. Pusbang, SDM Kebudayaan

Kebudayaan) di tahun 2010 memang sedang menata ulang birokrasi, yang dikemas dalam program Reformasi Birokrasi Internal (RBI). RBI menata ulang kembali ketika fungsi kebudayaan diintegrasikan kembali dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 19 Oktober 2011. Perubahan diawali dari nomenklatur Departemen Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian masuknya fungsi kebudayaan, sehingga nomenklatur berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemutasian atau promosi pegawai juga bukan semata menjadi keputusan dari Shabri Aliaman sebagai Kepala Pusat. Melainkan juga berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di Kemdikbud. "Siapa yang masuk ke Direktorat atau Pusbang itu ibaratnya berebut pegawai. Yang saya tahu ada yang tadinya sudah masuk di daftar pegawai Pusbang, namun rapat-rapat lagi sudah berubah lagi," kata Sanggupri.



Dok. Pusbang SDM Kebudayaan

Kehadiran Pusbang SDM Kebudayaan menjadikan tantangan tersendiri bagi lingkungan pegawai Ditjen Kebudayaan yang sebelumnya tak pernah sama sekali berada di unit kerja yang khusus menangani SDM kebudayaan. Shabri pun mengawali pencarian staf dan pegawainya dari lingkungan Direktorat Nilai Sejarah.

- Suasana di kantor lama, Gedung E lantai 8. Berfoto bersama di awal terbentuknya Pusbang SDM Kebudayaan. (Juli 2012).

Sanggupri dan sejumlah stafnya di Direktorat Nilai Sejarah sudah diajak rapat-rapat penyiapan program dan kegiatan pengembangan SDM Kebudayaan. Padahal ketika itu belum resmi ada pengangkatan. "Dari awal saya, Andi Rijal dan sejumlah staf di Direktorat Nilai Sejarah, memang sudah dilibatkan untuk menyusun program dan kegiatan. Tapi ketika saya dan teman-teman yang



ikut rapat disebut sukarelawan. Sebab memang belum ada yang pasti bergabung ke Pusbang SDM Kebudayaan,” kata Sanggupri.

Sanguptri dan sejumlah staf Direktorat Nilai Sejarah yang dilibatkan dalam rapat-rapat awal itu sebenarnya tak canggung lagi membahas kebijakan dan program baru. Sebab Sanggupri dkk merupakan tim Penyusun Rencana Program Dit. Nilai Sejarah. “Problemnya kami belum pernah menyusun pengembangan SDM kebudayaan,” katanya.

Harapan Shabri mendapat karyawan dari latar belakang beragam tidak sepenuhnya terpenuhi. Gerbong karyawan yang pada

akhirnya bergabung sebagian besar dari Direktorat Nilai Sejarah. "Selebihnya adalah dari permuseuman, geografi sejarah, dan arkeologi bawah air," kata Sanggupri. Pos eselon IV Bidang Peningkatan Kompetensi kemudian diisi oleh Dra. Puspa Dewi, sebelumnya dari Direktorat Nilai Sejarah dan Aryanti Budhiastuti, SH, yang sebelumnya berasal dari Direktorat Geografi Sejarah.

Menurut Budiharja, sebelum ia bergabung ke Pusbang SDM Kebudayaan, ia sudah santer mendengar ada numenklatur baru, baik di direktorat-direktorat di Ditjen Kebudayaan dan kehadiran Pusbang SDM Kebudayaan. "Nah, oleh Direktur Museum Intan Mardiana, saya ditugaskan bergabung ke Pusbang SDM Kebudayaan," kata Budiharja.

Budiharja sendiri sudah mengenal Shabri sejak masih memimpin Unit Pelaksana Teknis. Shabri sebelumnya pernah menjabat Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. Sementara Budiharja pernah menjabat Kepala Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta dan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.

Di jajaran eselon IV, melengkapi para kepala subbidang bergabung pula Helena Listyaningtyas, SH, sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha Pusbang SDM Kebudayaan. "Saya sebelumnya di Sekretariat Ditjen Kebudayaan. Sebagai pegawai, saya melihat jabatan itu amanah, sehingga mau ditempatkan di mana saja, saya terima," kata Listyaningtyas.

Dok. Pusbang SDM Kebudayaan



“KAMI URUNAN UANG
SEHINGGA TERKUMPUL
RP 20 JUTA. UANG
INI DIPAKAI UNTUK
MEMBELI GALON AIR
MINUM, KERTAS, TINTA,
DLL...”



C. TERTATIH DI AWAL KEBANGKITAN

Bak kisah drama, dimulailah perjalanan Pusbang SDM Kebudayaan dengan didukung 27 karyawan, termasuk 8 orang pimpinan. Di kantor sederhana, yang sebagian besar sarana dan prasarana belum ada. Pusbang SDM Kebudayaan belum mendapat anggaran antara April-September 2012. Anggaran Pusbang SDM Kebudayaan baru turun pada 1 Oktober 2012, yang berasal dari APBN Perubahan.

“Kami bekerja dengan peralatan seadanya. Saya masih ingat dipinjami infokus warna putih milik Badan PSDMPK-PMP. Kami juga diberi kertas. Sedangkan peralatan yang masih ada seperti printer dan beberapa peralatan lama di Direktorat Nilai Sejarah masih bisa kami pakai,” kata Sanggupri.

Perjuangan sehari-hari pun menjadi kenangan tersendiri yang tak terlupakan. "Kami *urungan* uang sehingga terkumpul Rp 20 juta. Uang ini dipakai untuk membeli galon air minum, kertas, tinta. Kalau makan siang beli sendiri-sendiri," kata Sanggupri. Uang tersebut kemudian dikembalikan setelah anggaran bisa dicairkan.

Tak sedikit staf yang mengeluh mengawali kerja setiap hari. "Ada staf yang tidak jelas visinya ke mana, sementara staf-staf lain di lingkungan Ditjen Kebudayaan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kerja kita waktu itu, sejak Mei-September 2012, memang hanya kumpul mengadakan rapat, menyusun konsep, program dan kegiatan pengembangan SDM kebudayaan, belum ada kegiatan ke luar," kata Sanggupri.

Setidaknya ada lima orang staf yang mengajukan pindah. Mereka kemudian mendapat penjelasan dari Shabri bahwa Pusbang SDM Kebudayaan ke depan punya visi misi yang bagus. Kondisi tanpa anggaran selama enam bulan sebenarnya tidak diduga. Ketika itu Pusbang SDM Kebudayaan sudah mengajukan anggaran tahun 2012 sebesar Rp 43 miliar. Namun anggaran baru turun pada 1 Oktober 2012.

Pegawai Pusbang SDM Kebudayaan kini berjumlah 52 orang, 15 orang di antaranya pegawai tidak tetap. Sejumlah karyawan baru yang bergabung, di antaranya berasal dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK). ■



BAB 4
RAGAM
SDM KEBUDAYAAN

BAB 4

RAGAM

SDM KEBUDAYAAN

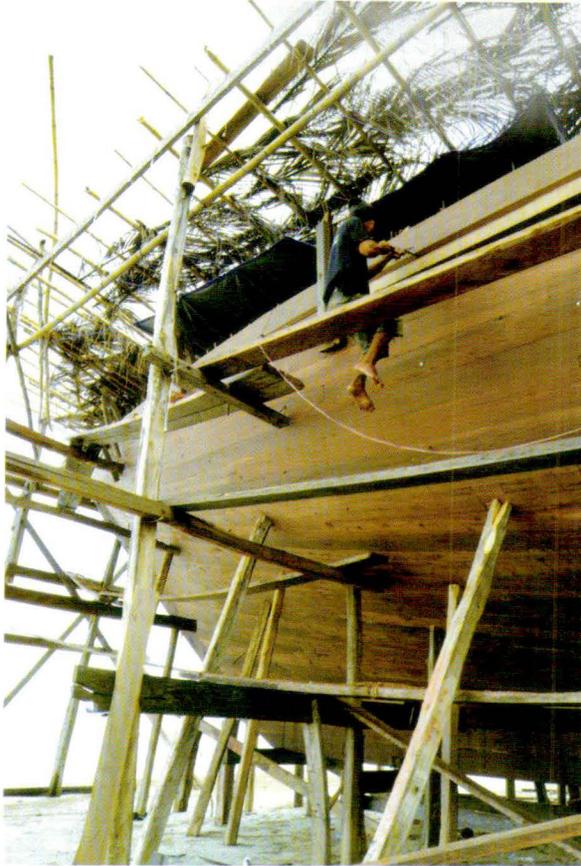
Indonesia memiliki budaya yang sangat kaya dan beragam, mulai dari cagar budaya, kesenian, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Tapi, keragaman budaya tersebut belum diimbangi dengan upaya perlindungan yang kuat. Sejumlah kasus pencurian benda-benda cagar budaya dan klaim asing atas budaya Indonesia bisa menjadi bukti tentang itu. Fenomena ini menunjukkan bahwa SDM kebudayaan masih lemah dalam mengelola sumber daya budaya.

Di sisi lain, jenis dan sebaran SDM kebudayaan belum terdistribusi dengan baik. Terdapat beberapa wilayah memiliki SDM kebudayaan sangat melimpah, tapi wilayah lain memiliki hanya sedikit SDM



Majalah Insan Budaya

kebudayaan. Kondisi tersebut menunjukkan penanganan terhadap SDM kebudayaan sangat diperlukan. Oleh karena itu sejak keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SDM kebudayaan mulai tertangani secara khusus dengan dibentuknya Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan (Pusbang SDM Kebudayaan), yang bernaung di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP).



Dipo Handoko

- Para pembuat pinisi ini termasuk SDM pelestari tradisi bahari, dari sedikit orang yang disebut ahli pembuat kapal pinisi (panrita lopi).

yang fokus pada suatu bidang tertentu yang berdaya saing tinggi baik pada level nasional maupun internasional. SDM kebudayaan yang dicita-citakan tersebut diwujudkan melalui peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, diamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terwujudnya suasana

kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespons modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Salah satu komponen penting dalam pembangunan kebudayaan adalah sumberdaya manusianya. Sumber Daya Manusia Kebudayaan (SDM Kebudayaan) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi merupakan salah satu aspek yang akan mendukung kemajuan pembangunan bangsa. Untuk memanfaatkan peluang yang ada, pengembangan SDM Kebudayaan harus diutamakan pada penguasaan



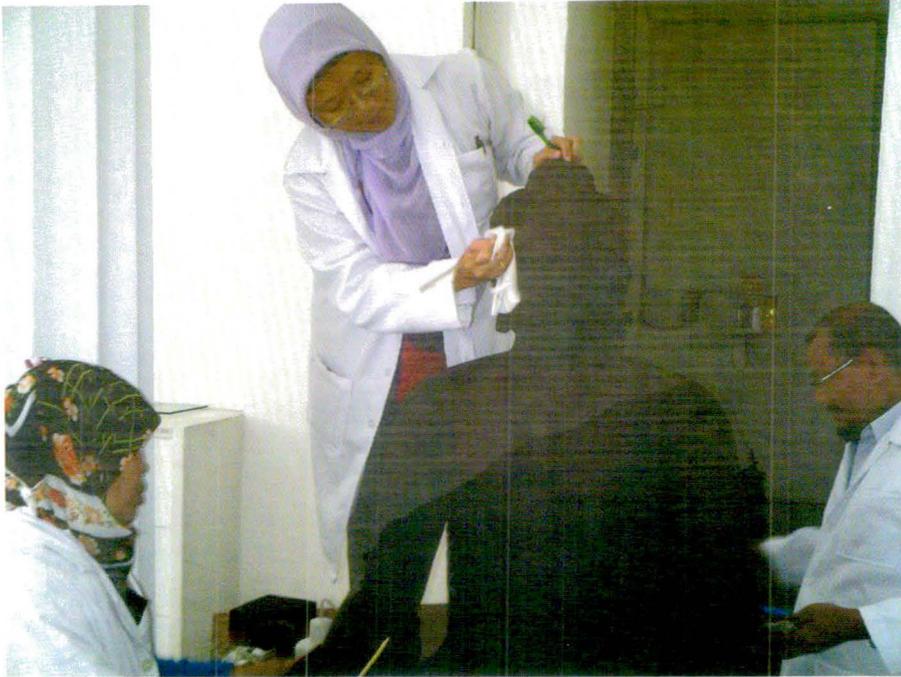
Majalah Insan Budaya



Dok. Museum Nasional

kompetensi yang fokus pada suatu bidang tertentu yang akan mampu berdaya saing tinggi baik pada level nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan SDM Kebudayaan seperti yang dicita-citakan tersebut diperlukan basis data yang lengkap dan terkini. Untuk itu diperlukan data SDM Kebudayaan yang menjadi dasar dalam menyusun dan merencanakan kebutuhan SDM Kebudayaan yang kompeten.

Hasil pendataan tersebut sangat penting, bukan hanya dalam rangka pemanfaatan SDM Kebudayaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya saat ini. Namun juga berhubungan dengan kepentingan di masa depan, meliputi penentuan kebutuhan SDM Kebudayaan, baik dalam arti kuantitas maupun kualitas, serta kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas. Di samping itu, dengan tersedianya informasi yang lengkap tentang SDM Kebudayaan maka peningkatan kompetensi dapat dilakukan secara efektif dan efisien guna mendukung pelaksanaan tugas SDM Kebudayaan.



Dok. Ita Yuliati

A. JENIS PROFESI/PEKERJAAN SDM KEBUDAYAAN

SDM kebudayaan dapat dikelompokkan ke dalam tujuh bidang profesi/pekerjaan, yakni bidang cagar budaya, permuseuman, kesejarahan, nilai budaya, kesenian, perfilman, dan kebahasaan.

1. Bidang Cagar Budaya

- a. SDM Pelindungan Cagar Budaya: Tenaga Registrasi CB, Tenaga Pengamanan CB, Tenaga Pemeliharaan CB, Tenaga Pemugaran CB, Tenaga Konservasi, Tenaga Dokumentasi, Tenaga Publikasi, Juru Pelihara, Juru Gambar, Polisi PNS, dan Polisi Khusus.
- b. SDM Pengembangan Cagar Budaya: Peneliti CB, Revitalisasi CB, dan Adaptasi CB.

2. Bidang Permuseuman

SDM Permuseuman: Registrator, Kurator, Edukator, Konservator, Restorator, Penata Pameran, Humas, dan Promosi.

3. Bidang Kesejarahan

SDM Pelestari Sejarah: Sejarawan, Peneliti Sejarah, Pelaku Dokumentasi Sejarah, Penilik Kebudayaan, Verifikator Sejarah, Pendidik Sejarah, Penulis Sejarah, dan Pemandu Wisata Sejarah.



Dok. Majalah Insan Budaya

4. Bidang Nilai Budaya

- a. SDM Pelestari Nilai Budaya: Peneliti budaya, Pamong Budaya, Pustakawan, Pendidik Budaya, Pelaku Dokumentasi Nilai Budaya, dan Manajer Budaya/Administrator Budaya
- b. SDM Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME: Pembina Penghayat, Pemuka Organisasi Penghayat, dan Pelaku Advokasi Budaya.

- c. SDM Diplomasi Budaya: Penyuluh/Pamong Budaya, Diplomat Budaya, dan Pekerja Eksibisi Budaya
- d. SDM Internalisasi Nilai-nilai Budaya: Penyuluh Budaya.

5. Bidang Kesenian

SDM seni rupa: Pelukis, Pembatik, Pematung, Pegrafis, Keramikus, Desainer Mode/Tekstil, Desainer Produk, Desainer Interior-Eksterior, Desainer Grafis, Kriawan Kayu (pembuat topeng, dll.), Kriawan Logam (empu keris, dll.), Kriawan Kaca, Kriawan Nambu, Kurator Seni Rupa (Senior Curator, Curator, Associate Curator, Asistant Curator, Independent Curator), Pengamat/Kritikus, Pengkaji/Peneliti/Sejarawan seni rupa, Konservator Seni Rupa, Pendidik Seni, Juru Lelang (Auctioner), Dokumentator/Arsiparis, Seni Rupa, Penenun, Arsitek/undagi, Arsitek Lanskap, Komikus/Kartunis/Karikaturis/Illustrator, Seniman tato, Seniman



Video (Video Artist), Seniman Fotografer, Edukator Ekshibisi, Penata Pameran, dan Seniman Pertunjukan (Performance Artist).

SDM seni pertunjukan: Penari, Penyanyi/Penembang/Sinden/Pengudung, Penyair, Musisi/Musikus (Komposer, Pengrawit, Pangripto), Penabuh (Musik Klasik/Tradisional), Aktor Teater/Drama (Seni Tradisi, Modern, Kontemporer), Penata Artistik, Manajer Panggung (Stage Manager), Penata Lampu (Lighting Manager), Dalang, Penata Rias Pentas (Make-Up Artist), Sutradara dan Asisten, Sutradara, Penulis Hikayat, Pembaca Hikayat, Kurator Seni Pertunjukan atau Dramaturgis (Ahli Pertunjukan), Peneliti/Pengkaji/Sejarawan Seni Pertunjukan, Pengamat dan Kritikus Seni Pertunjukan, Penata Peran (Casting), Penata Busana (Desainer Kostum), Penata Efek (Desainer Efek Visual dan Suara), Penata Tari, Penata Musik, Konduktor, Penulis Naskah, Penata Artistik, Pendongeng (*Story Teller*)/Pencerita, Pelawak, Pesulap (Magician), Seniman Akrobat, dan Pantomimer.



Dipo Handoko



6. SDM Bidang Perfilman

SDM perfilman: Pembuat Film Mandiri (Film Maker), Sutradara Film (Asisten Sutradara), Produser Film, Juru Kamera Film (Cameraman), Penata Artistik Film, Penata Suara Film, Penata Musik Film, Penata Lampu Film, Penulis Naskah Film, Penyunting (Editor) Film dan Sensor Film, Storyboarder Film, Kurator Film, Pengamat /Pengkaji /Peneliti Film, Aktor /Aktoris Film, Kritikus Film, Pemeran Pengganti (Stuntman) Film, Penata Efek Film, Narator Film, Penyunting Suara Film, Sulih Suara Film, Perancang Animasi Film (Animator), Penata Rias Film, Penata Rambut Film, Arsiparis Film, Tenaga Sensor Film, Operator Proyektor Film (Seluloid dan Digital), Operator Pengukuran Film, dan Tenaga Teknisi Film.

7. SDM Bidang Kebahasaan

SDM kebahasaan erat kaitannya dengan kesusastraan yang juga bersinggungan dengan pelaku nilai budaya, khususnya pada tradisi lisan.

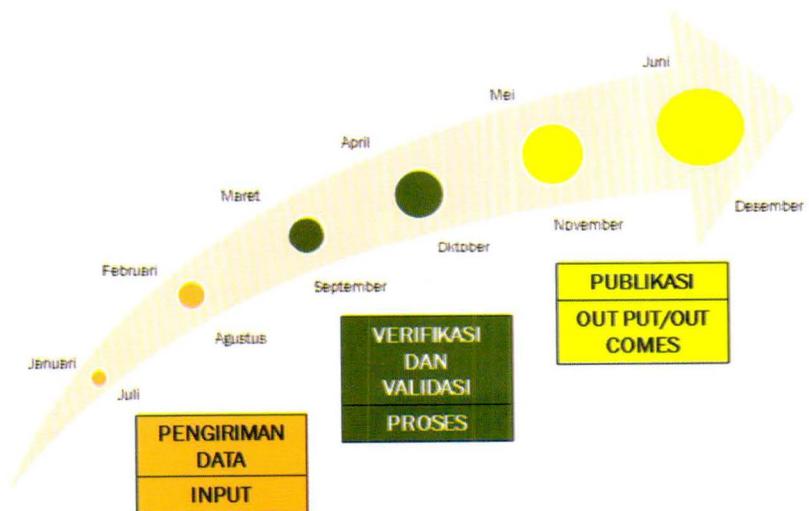
B. PENDATAAN SDM KEBUDAYAAN

Salah satu komponen penting dalam pembangunan kebudayaan adalah sumber daya manusia kebudayaan (SDM kebudayaan). Sebelum kehadiran Pusbang SDM Kebudayaan, pengelolaan SDM kebudayaan belum didukung oleh akurasi dan validitas data SDM kebudayaan. Padahal perlu pendataan dan verifikasi data SDM kebudayaan sebagai menjadi dasar dalam menyusun dan merencanakan kebutuhan dan pengembangan SDM kebudayaan.

Pusbang SDM Kebudayaan menjadi perintis pendataan SDM Kebudayaan. Langkah penting yang dilakukan di awal terbentuknya Pusbang SDM Kebudayaan, tahun 2012 silam, adalah inventarisasi ragam dan jenis SDM kebudayaan, sekaligus pendataan SDM kebudayaan. Sasarannya adalah 52 unit kerja kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka terdiri dari Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Kebudayaan yang tersebar di daerah.

Kebijakan pemutakhiran data yang dilakukan selama satu tahun anggaran adalah melalui tiga tahapan, yakni

KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA SDM KEBUDAYAAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN SDM KEBUDAYAAN



pengiriman data (input), tahap verifikasi dan validasi, serta tahap publikasi.

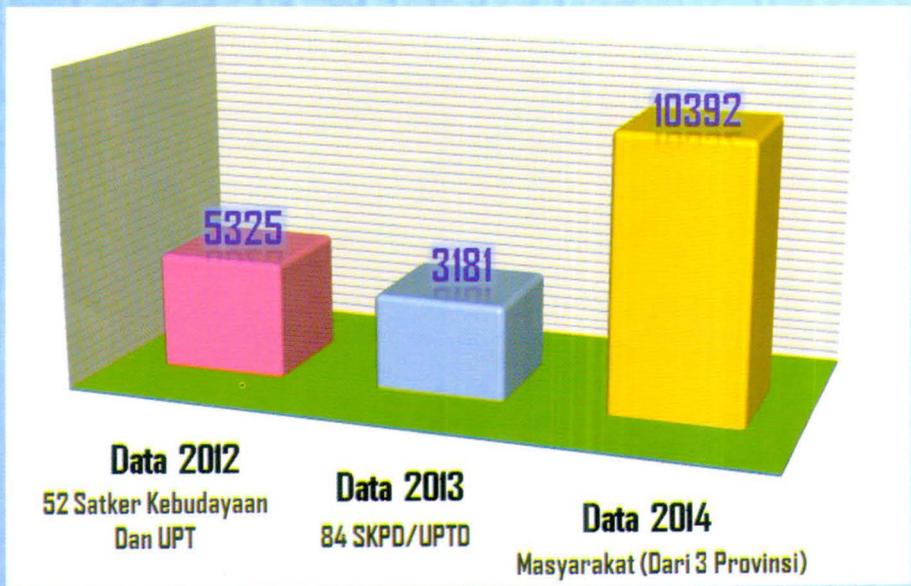
Data awal yang terkumpul sebanyak 6.100 orang dengan komposisi 36% adalah non-PNS dan 64% selebihnya adalah PNS. Dari data ini dihasilkan juga peta kondisi SDM kebudayaan di 52 unit kerja kebudayaan tersebut dan beberapa kategori data, yaitu data diri, pendidikan formal, diklat/pelatihan/bimtek, dan data kompetensi SDM. Hasil pemutakhiran data per tanggal 30 November 2014, data SDM kebudayaan pada 52 unit kerja tersebut sebanyak 5325 orang.

Pada tahun 2013, Pusbang SDM Kebudayaan melanjutkan pendataan dengan sasaran 33 Dinas Provinsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) bidang kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yakni Taman Budaya, Museum Negeri atau Museum Swasta yang dibiayai Pemerintah Provinsi. Hasil pemutakhiran data per tanggal 30 November 2014, data SDM kebudayaan pada 84 SKPD/UPTD sebanyak 3.181 orang.



Pendataan ini juga dikerjasamakan dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang berkedudukan di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia, dalam hal ini pegawai LPMP bertugas sebagai operator. Sebagai UPT Kemdikbud di daerah, LPMP yang sudah berpengalaman dalam pendataan guru dan tenaga kependidikan, bertugas mendampingi petugas pencacah dari Dinas Provinsi. Pada tahun 2013 Pusbang SDM Kebudayaan juga bermitra dengan STIS-BPS.

Tahun 2014 kegiatan pendataan SDM kebudayaan menasar pada SDM kebudayaan di masyarakat. Ujicoba pendataan dilakukan di tiga provinsi piloting, yakni Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Banten. Jumlah peserta calon pencacah tiap provinsi antara 150-190 orang. Mereka direkrut dari petugas-petugas sensus penduduk yang ada di kecamatan. Hasil pencacahan yang dilakukan pada tiga provinsi tersebut terdapat SDM kebudayaan di masyarakat sebanyak 10.392 orang. ■





BAB 5
CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2012-2014

BAB 5

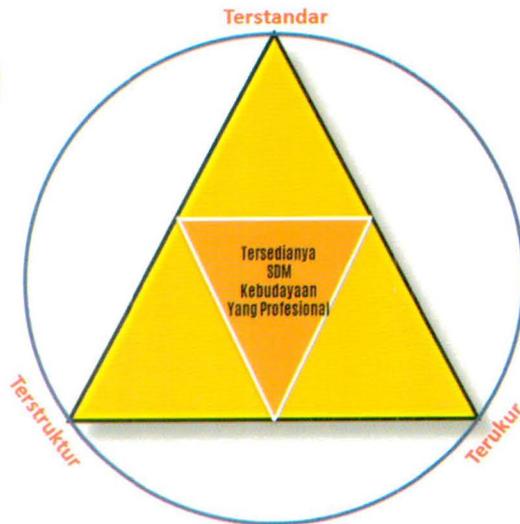
CAPAIAN KINERJA

TAHUN 2012-2014

Terobosan penting Pusbang SDM Kebudayaan dalam mengembangkan SDM kebudayaan adalah ditetapkannya tata nilai pengembangan SDM kebudayaan. "Kami melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM kebudayaan berdasarkan tata nilai yang terstruktur, terstandar, dan terukur," kata Shabri.

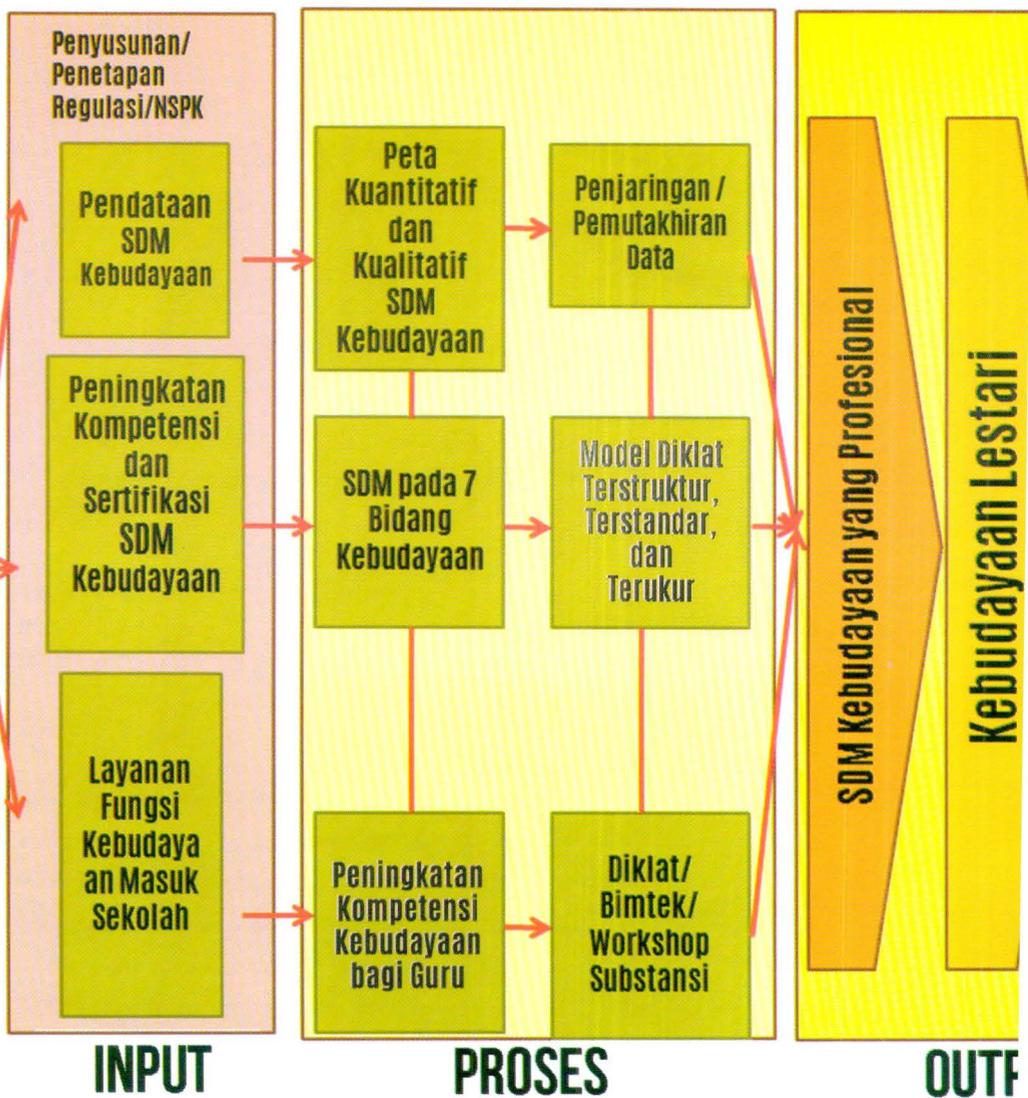
Tata nilai pengembangan SDM kebudayaan tersebut sudah memiliki payung hukum dengan

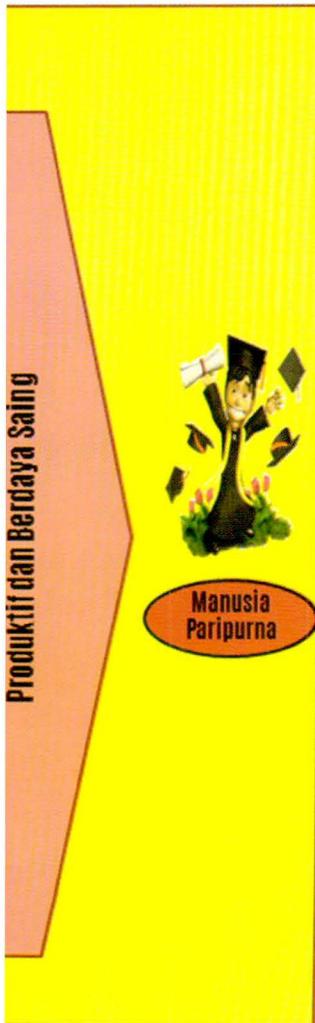
**TATA NILAI
PENGEMBANGAN
SDM
KEBUDAYAAN**



ditetapkannya Peraturan Mendikbud Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan. Terbitnya pedoman pengembangan SDM kebudayaan ini menjadi tonggak penting, sebab selama ini belum ada standar dan acuan dalam pengembangan SDM kebudayaan.

3 Program Prioritas
(2012-2014 dan 2015-2019)



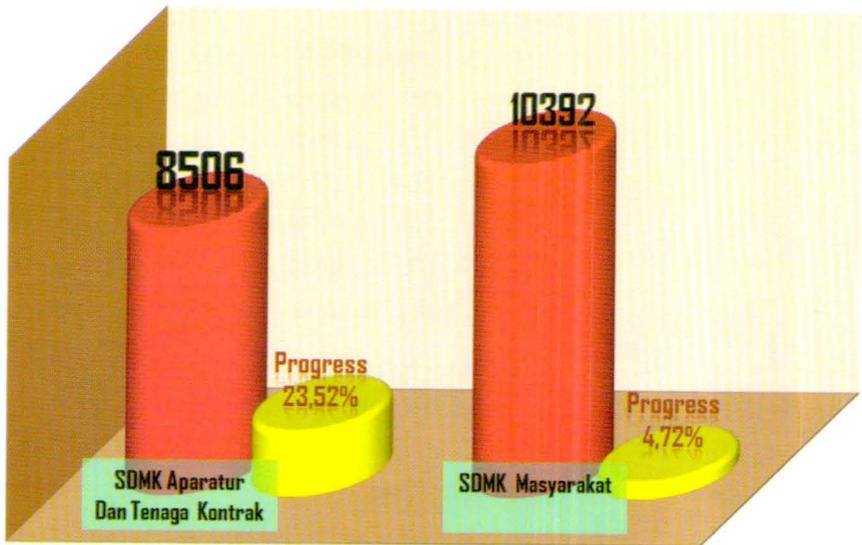


UTCOMES

Program prioritas Pusbang SDM Kebudayaan pada tahun 2012-2014 dilanjutkan pada periode 2014-2019 adalah menetapkan regulasi terkait: 1) pendataan; 2) peningkatan kompetensi dan sertifikasi; dan 3) layanan fungsi kebudayaan masuk sekolah. Pada bidang pendataan, fokus kegiatan diarahkan pada penyusunan peta kuantitatif dan kualitatif SDM kebudayaan serta kegiatan pemutakhiran data SDM kebudayaan.

Kegiatan terkait peningkatan kompetensi dan sertifikasi difokuskan untuk SDM pada tujuh bidang kebudayaan, yakni: a) cagar budaya; b) permuseuman; c) kesejarahan; d) nilai budaya; e) kesenian; f) perfilman; dan g) kebahasaan. Kegiatan pendidikan pelatihan yang dikembangkan dapat dalam bentuk diklat, bimbingan teknis, lokakarya, atau pun model nondiklat yang berupa apresiasi, magang, dan pengembangan potensi diri. "Namun intinya satu, berbagai model diklat tersebut harus terstruktur, terstandar, dan terukur," kata Shabri.

Sedangkan prioritas layanan fungsi kebudayaan masuk sekolah adalah mendukung implementasi kurikulum melalui berbagai kegiatan, misalnya peningkatan kompetensi kebudayaan bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, baik melalui diklat, bimtek, atau lokakarya.



Setidaknya ada dua hal utama pengembangan SDM kebudayaan yang sudah dicapai Pusbang SDM Kebudayaan dalam waktu relatif singkat, yakni pendataan SDM kebudayaan dan peningkatan kompetensi kebudayaan.

Pendataan pada 2012 menjangkau 52 satker kebudayaan dan UPT tercatat 5.325 orang. Tahun 2013 sudah bertambah meliputi 84 SKPD/UPTD tercatat sebanyak 3.181 orang. Tahun 2014 menjangkau data SDM kebudayaan di masyarakat di Provinsi Banten, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat, tercatat sebanyak 10.392 orang. Sedangkan capaian peningkatan kompetensi SDM kebudayaan aparatur dan tenaga kontrak sudah mencapai 23,52% dan 4,72% untuk SDM kebudayaan di masyarakat.



KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI DI TAHUN 2012-2014

Berdirinya Pusbang SDM Kebudayaan punya beban tak ringan. Mengingat selama ini meskipun Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman budaya, persoalan SDM kebudayaan belum tertangani secara serius. "Langkah pertama yang harus kami lakukan adalah bagaimana kami betul-betul menyisir ke bawah untuk mendapatkan data keragaman SDM kebudayaan," kata Shabri Aliaman.

Langkah awal di tahun 2012, Pusbang SDM Kebudayaan adalah menyelenggarakan Rapat Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang digelar di Yogyakarta pada

NO	TAHUN	KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI										
		Pelestari C B	PPNS	Pengelola Museum	Pemandu Museum	Duta Museum	Kurator Museum	Konservator Koleksi Museum	Guru Seni Budaya	PK Tenaga Kependidikan	Pengem. Diri SDM internal	Deselanan
1	2012	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-
2	2013	180	-	60	60	-	60	-	468	-	40	6
3	2014	80	30	-	30	-	35	35	743	75	50	7
Jumlah		260	30	60	90	66	95	35	1211	75	90	13

Catatan :

* Hasil akhir data SDMK : 18.898 Orang

- ✓ Th. 2012 : 5.325 Orang (52 Satkerbud Pusat dan UPTD)
- ✓ Th. 2013 : 3.181 Orang (84 SKPD Bud, Museum Prov. Dan TB)
- ✓ Th. 2014 : 10.392 Orang (SDMK di 3 provinsi uji coba)

* SDMK yg telah difasilitasi Peningkatan Kompetensi : 2491 Orang

- ✓ PNS / Aparatur : 2001 Orang
- ✓ Masyarakat / Non Aparatur : 490 Orang

•Persentase Realisasi : 13,2 %

Sumber: Pusbang SDM Kebudayaan, 30 November 2014

Penyuluh Budaya	Manajemen Semi	TOTAL
100	-	166
150	-	1138
-	35	1187
250	35	2491

Oktober 2012. Langkah perdana itu diharapkan terbentuk kebijakan dan program terarah, terencana, dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu juga diarahkan mewujudkan SDM yang berkompeten; yakni yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku profesional yang mampu berdaya saing tinggi baik pada level nasional maupun internasional.

Raker mengusung tema "Koordinasi, Sosialisasi dan Sinkronisasi peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan." Pesertanya berasal dari unit kerja yang ada di pusat sebanyak 57 orang (terdiri atas 13 narasumber, 17 panitia, dan 27 peserta) dan peserta dari Unit Pelaksana Teknis dari daerah sebanyak 104 orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan Raker tersebut adalah tersusunnya rumusan rekomendasi peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM kebudayaan, yang antara lain memetakan 136 jenis profesi SDM kebudayaan.

Dalam pertemuan ini juga dibuat pernyataan komitmen mendukung pelaksanaan peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM kebudayaan. Kompetensi SDM kebudayaan adalah kemampuan kerja setiap individu SDM kebudayaan yang mencakup aspek etika, pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Kompetensi SDM kebudayaan dimaksud meliputi

bidang cagar budaya, permuseuman, kesejarahan, nilai budaya, kesenian, perfilman, dan kebahasaan.

Kegiatan berikutnya adalah Monitoring dan Evaluasi (Monev) SDM Kebudayaan berlangsung di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, pada tanggal 13-18 Desember 2012. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau, mengamati, menilai, mengetahui perkembangan dan permasalahan termasuk pemecahan permasalahan yang dialami di lapangan khususnya terkait dengan SDM Kebudayaan.



Kegiatan ini dilaksanakan Kepala Bidang Sertifikasi Pusbang SDM Kebudayaan, Kepala Subbidang Evaluasi pada Bidang Peningkatan Kompetensi, dan diikuti oleh dua orang staf. Selama kegiatan berlangsung turut dibantu pula oleh pegawai dari BPCB Jawa Tengah. Kegiatan Monev bertujuan untuk mendapatkan peta kompetensi dan sertifikasi serta pemetaan diklat SDM kebudayaan khususnya PNS di Unit Utama maupun UPT Pusat dan daerah serta yang tersebar di masyarakat.

Monev dilakukan di beberapa lokasi yang mempunyai SDM juru pelihara. Adapun lokasi monev adalah Candi Plaosan, Candi Sewu, Candi Sojiwan, Candi Ijo, Candi Prambanan, Komplek Keraton Ratu Boko, Masjid Alit Jatinom Klaten, Candi Suku, dan Candi Cetho di Karanganyar. Monev dilakukan dengan kunjungan langsung ke lapangan dan mewawancarai juru pelihara yang bertugas di lokasi tersebut.

Dari hasil wawancara dan peninjauan langsung di lokasi monev, diperoleh data banyak juru pelihara sebagai bagian dari SDM kebudayaan belum memiliki sertifikat atau kompetensi untuk pengelolaan dan perawatan benda cagar budaya. Kemampuan yang mereka miliki pada umumnya menjaga kebersihan lingkungan benda cagar budaya, yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus.

Para juru pelihara tersebut menginginkan pelatihan dan pendidikan khusus terkait dengan pengelolaan dan perawatan benda cagar budaya.

Selama ini mereka ada yang sudah beberapa kali mengikuti bimbingan teknis ataupun pendidikan dan pelatihan. Namun belum ada pengembangan kemampuan. Mereka berharap mendapat bimbingan teknis dan pelatihan yang sesuai. Tidak hanya pelatihan teknis, tapi juga penguasaan bahasa asing dan penguasaan teknologi informasi.

Kebijakan berikutnya adalah menyusun Pola Dasar dan Pedoman Pengembangan SDM Kebudayaan, dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi SDM Kebudayaan. Kegiatan lainnya adalah Pendataan dan Pemetaan SDM Kebudayaan. Tahun 2012 lalu, fokus pendataan dilakukan pada 52 unit satuan kerja kebudayaan di pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Data SDM dipetakan berdasarkan jenis profesi dan kompetensi yang dimiliki dalam bentuk data diri ke dalam format digital berbasis web.



Pendataan ini menjadi program kegiatan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang yang akan menjangkau data SDM kebudayaan di pemerintah daerah maupun di masyarakat dengan basis data di kabupaten/kota.

Pusbang SDM Kebudayaan tahun 2012 juga merumuskan pola peningkatan kompetensi SDM kebudayaan dalam berbagai metode, di antaranya, melalui tatap muka dalam bentuk workshop, diklat-diklat dan sejenisnya. Peningkatan kompetensi juga telah dirumuskan dengan cara pemberian penghargaan bagi insan budaya berprestasi sesuai bidang dan jenis profesinya. Terdapat pula kebijakan pemberian beasiswa kepada SDM kebudayaan dalam rangka peningkatan kompetensi melalui peningkatan kualifikasi.

"Kita juga mulai menyiapkan uji kompetensi dan pemberian sertifikat kompetensi untuk pemetaan level kompetensi dari masing-masing individu sesuai jenis dan profesinya. Tetapi kebijakan ini belum bisa dilaksanakan karena masih harus menunggu adanya regulasi atau payung hukum sebagai bahan pijakan," lanjut Shabri Aliaman.

Sanggupri menjelaskan bawah, sesuai amanat Syawal Gultom, Kepala BPSDPMPK-PMP, yang dimuat pada Majalah Insan Budaya Edisi 1 Tahun 2013, menegaskan perlunya meningkatkan "Kompetensi Dulu Baru Sertifikasi." Untuk itu, Pusbang SDM Kebudayaan telah melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi untuk SDM kebudayaan. Peningkatan kompetensi ini dilaksanakan berdasarkan tata nilai terstruktur, terstandar, dan terukur. Oleh sebab itu, sebelum pelaksanaan peningkatan kompetensi, terlebih dahulu disusun standar kompetensi lulusan, kurikulum, dan modul-modul pelatihan serta standar evaluasinya.

1. Peningkatan Kompetensi Duta Museum

Kegiatan peningkatan kompetensi SDM kebudayaan yang dilakukan di tahun 2012 adalah pelatihan Duta Museum dan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Budaya. Sebanyak 66 pemuda pemudi yang mewakili 33 provinsi di seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta, pada November 2012 lalu. Mereka, para Duta Museum terpilih, tampak penuh perhatian mengikuti beberapa pengarahan dan pembekalan, termasuk yang disampaikan oleh Shabri Aliaman. Juga ada tiga pembicara yang berkompeten di bidangnya, dari beberapa pengajar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Saat kegiatan diskusi dibuka, berbagai pertanyaan mengemuka dari para Duta Museum. Antusiasme mereka merebak, demi mengingat misi bahwa mereka akan menjadi garda depan dalam pengembangan dan sosialisasi museum di Indonesia.



Kegiatan ini merupakan sebuah wadah untuk meningkatkan wawasan dan apresiasi kebudayaan. Dikemas melalui jadwal yang padat dan menyenangkan, kegiatan ini memberikan pembekalan dan pengetahuan kepada seluruh Duta Museum mengenai kebudayaan dan segala aspek pendukung, termasuk museum. Berbagai materi telah dipersiapkan untuk memperkaya wawasan mereka, meliputi; kesejarahan, nilai budaya, kesenian dan perfilman, pelestarian cagar budaya, permuseuman, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tradisi, dan arkeologi. Dengan memahami kebudayaan, para Duta Museum ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Duta Museum.

2. Pembekalan Pamong Budaya/Penyuluh Budaya

Kegiatan pembekalan ini untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Pamong Budaya/Penyuluh Budaya Non-PNS. Kegiatan yang diselenggarakan November 2012 ini diikuti seratus peserta, terdiri dari masyarakat umum dari berbagai rayon penyelenggaraan perekrutan yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Acara yang mengusung tema "Pamong Budaya sebagai Pelopor Penggerak Pelestarian Budaya Bangsa" ini dibuka oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Abi Sujak.



Dok. Majalah Insan Budaya

Kegiatan pembekalan melingkupi penyelenggaraan tes, ceramah umum, evaluasi, praktek lapangan, maupun praktek penyusunan laporan kelompok. Peserta dibekali dengan materi aspek-aspek kebudayaan, meliputi; kesejarahan, nilai budaya, kesenian dan perfilman, pelestarian cagar budaya, permuseuman, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi dan arkeologi.

Pembekalan terhadap calon pamong budaya ini memberikan tambahan pengetahuan kebudayaan. Selain itu juga membentuk jaringan para pamong, sehingga dapat membentuk kekuatan budaya secara nasional. Pengetahuan yang diperoleh para pamong dalam pembekalan dapat menjadi bekal sebelum terjun langsung ke lapangan. Sedangkan

jaringan silaturahmi yang terbentuk pada masa pembekalan diharapkan dapat menjadi ajang komunikasi dan koordinasi untuk program pengembangan kebudayaan di daerah. Kegiatan pembekalan pamong budaya ini dilanjutkan pada tahun 2013. Pesertanya ditingkatkan menjadi 150 orang.

- Kepala BPSDMPK-PMP, Syawal Gultom, berpose bersama Kepala Pusbang SDM Kebudayaan, Shabri Aliaman, didampingi Kabid Peningkatan Kompetensi, Sanggupri (kanan), Kabid Sertifikasi, Budiharja (kiri) dan Ka Subbid Program, Bidang Peningkatan Kompetensi, Puspa Dewi (paling kiri).

3. Peningkatan Kompetensi Pelestari Cagar Budaya

Peningkatan Kompetensi Pelestari Cagar Budaya sudah dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2014. Kegiatan tahun 2013 diikuti 180 orang, sedangkan tahun 2014 diikuti 80 peserta. Peserta



Majalah Insan Budaya



Dok. Majalah Insan Budaya

adalah tenaga teknis berstatus PNS utusan dari dinas pariwisata provinsi serta utusan UPT Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB), Ditjen Kebudayaan.

Peningkatan Kompetensi Pelestari Cagar Budaya tersebut digelar dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan teknis pelestari cagar budaya khususnya dalam menangani tugas-tugas di bidang pendaftaran cagar budaya, serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendaftaran cagar budaya di Indonesia.



Dok. Majalah Inisan Budaya

■ Dirjen Kebudayaan Prof. Dr. Kacung Marijan, MA didampingi Kepala Pusbang SDM Kebudayaan Drs. Shabri Aliaman, menyapa peserta Peningkatan Kompetensi Teknis Pengelola Museum di Cikeas, Bogor.

4. Peningkatan Kompetensi SDM Permuseuman

Kegiatan peningkatan kompetensi SDM permuseuman yang diselenggarakan tahun 2013 adalah Peningkatan Kompetensi Teknis Pengelolaan Museum di Cikeas, Bogor, 29 Juli-3 Agustus 2013, Peningkatan Kompetensi Teknis Pengelolaan Koleksi Museum, di Tangerang, 21-27 Oktober 2013, serta Peningkatan Kompetensi Teknis Pemandu Museum, di Tangerang, 23-29 Oktober 2013. Kegiatan peningkatan kompetensi untuk pengelola museum, pengelola koleksi museum, dan pemandu museum, masing-masing diikuti 60 peserta.

▶
Oting Rudy Hidayat, Kepala Seksi Promosi Museum Nasional, salah satu pengajar pada kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Pemandu Museum. Oting mengajar materi Masalah-masalah Bimbingan Edukasi.

Tahun 2014 juga dilaksanakan peningkatan kompetensi SDM permuseuman, yakni Peningkatan Kompetensi Teknis Pemandu Museum, yang diikuti

30 orang, kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Kurator Museum yang diikuti 35 orang, serta kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Konservator Koleksi Museum yang diikuti 35 orang peserta. Total SDM permuseuman yang mendapat peningkatan kompetensi sebanyak 280 orang.

"Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi teknis SDM permuseuman ini merupakan pengejawantahan program pengembangan SDM kebudayaan, yang menjadi tugas dan fungsi Pusbang SDM Kebudayaan," kata Shabri Aliaman.

"Museum dituntut menjadi sumber belajar, juga wahana rekreasi. Artinya, museum bukan hanya menjadi tempat menyimpan koleksi bersejarah. Museum tidak akan berarti apa-apa jika hanya berisi koleksi rekam jejak sejarah, jika tidak didukung SDM pengelola museum yang memadai," kata Shabri Aliaman, menambahkan.



Dipo Handoko



Foto-foto: Dok. Majalah Insan Budaya

- ▲ Foto atas: Kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Konservator Koleksi Museum, di antaranya, praktik langsung ke Candi Borobudur Magelang (11-23 September 2014)

Foto bawah: Dewi Puspa memberi penjelasan praktik lapangan kepada peserta Peningkatan Kompetensi Teknis Kurator Koleksi Museum. (24 Oktober-3 November 2014).

5. Peningkatan Kompetensi SDM Pedalangan

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Pedalangan sudah dua kali digelar. Tahun 2013 digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, 23-29 Juli 2013 sedangkan tahun 2014 dilaksanakan di Yogyakarta, pada tanggal 25-31 Maret 2014. Kegiatan yang digelar bekerja sama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) ini diikuti 134 dalang, dengan rincian 60 orang mengikuti kegiatan tahun 2013, selebihnya 74 orang mengikuti kegiatan di tahun 2014. Peningkatan kompetensi dalang setingkat dwijoworo, yang setelah mengikuti pelatihan ini akan melatih dalang di sanggar-sanggar pada daerahnya masing-masing.

"Dalang merupakan bagian SDM kebudayaan yang memainkan peranan penting dalam dunia pewayangan. Dalam memainkan peranan tersebut seorang dalang dituntut memiliki kemampuan dalam



memberikan tuntunan kepada penonton. Tuntunan itu bisa berupa nilai-nilai budaya untuk membangun karakter bangsa,” kata Shabri.

Tujuan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku para dalang. “Sehingga setelah pelatihan ini dapat menghasilkan dalang-dalang yang dapat diandalkan dan berperan sebagai pelestari budaya serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,” kata Shabri menambahkan.

6. Peningkatan Kompetensi Wartawan Kebudayaan

Kegiatan Peningkatan Kompetensi bagi Wartawan Kebudayaan dilangsungkan di Hotel Gumati, Bogor, tanggal 18-25 Juli 2013. Kegiatan diikuti 60 wartawan dari media cetak dan elektronik, lokal maupun nasional. Peserta lainnya adalah utusan dari unit kerja di lingkungan Kemdikbud, yakni Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman,



Mukti Ali

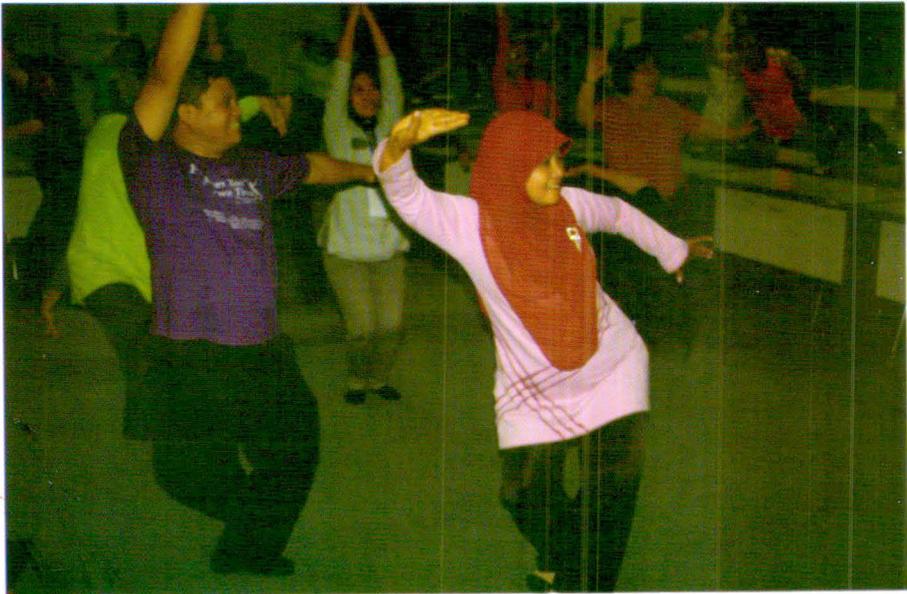
■ Praktik wawancara wartawan kebudayaan, di antaranya kepada tokoh Desa Sindang Barang, Bogor.

Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman, Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi, Direktorat Internalisasi dan Diplomasi Kebudayaan, Sekretariat Ditjen Kebudayaan dan PIH Kemdikbud. Peningkatan Kompetensi bagi wartawan ini bertujuan meningkatkan ragam tulisan terkait kebudayaan di berbagai media cetak, selain tulisan-tulisan selain kesenian.

7. Peningkatan Kompetensi Kebudayaan bagi Guru Mapel Seni Budaya SMP Kelas VII

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kebudayaan bagi Guru Mata Pelajaran Seni Budaya SMP Kelas VII diselenggarakan dua tahap. Tahap I

- Praktik menari pada materi Seni Tari pada Peningkatan Kompetensi Kebudayaan bagi Guru Mata Pelajaran Seni Budaya SMP Kelas VII.



Dok. P4TK Seni Budaya

dilaksanakan di LPMP Sumut, LPMP Sulsel, LPMP Bali dan P4TK Seni dan Budaya Yogyakarta. Pada tahap I yang diselenggarakan sepanjang Oktober-November 2013. Sementara tahap II diadakan di LPMP Sulsel dan P4TK Seni Budaya. Total guru seni budaya yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 468 orang.

Tema kegiatan adalah Peningkatan Kompetensi Kebudayaan Guru Mata Pelajaran Seni Budaya Sebagai Pendukung Implementasi Kurikulum 2013. Pusbang SDM Kebudayaan memang memiliki tanggung jawab mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013. Dalam pedoman Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 disebutkan bahwa Pusbang SDM Kebudayaan adalah unit kerja yang mengorganisasikan pelaksanaan pelatihan guru seni budaya dengan tugas-tugas merencanakan pelaksanaan pelatihan guru seni budaya dan bekerja sama dengan unit terkait mengembangkan bahan pelatihan guru seni budaya dalam implementasi Kurikulum 2013

Kegiatan . Peningkatan Kompetensi Kebudayaan bagi Guru Mata Pelajaran Seni Budaya ini juga dilaksanakan di tahun 2014, dengan diikuti 743 orang guru. Total sudah 1.211 guru sudah mengikuti peningkatan kompetensi.

8. Diklat Pembentukan PPNS Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman

Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dilaksanakan di Pusdik Reskrim, Lemdikpol, Megamendung, Bogor, 7 Oktober hingga 5 Desember 2014.

Diklat Pembentukan PPNS Cagar Budaya dan Permuseuman merupakan kerjasama Pusbang SDM Kebudayaan dengan Bareskrim Polri. Pesertanya sebanyak 30 orang yang berasal dari unit kerja kebudayaan, yakni dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dan sejumlah museum. Diklat dilakukan dengan pola 400 jam pelajaran.

PPNS merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang



lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian cagar budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana cagar budaya, sebagaimana diatur Pasal 100 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Keberadaan PPNS memang urgen dibutuhkan. Tak lain karena berbagai permasalahan cagar budaya, di antaranya, rawannya pelestarian cagar budaya dari tindak pidana, maraknya pencurian terhadap benda cagar budaya, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pelestarian dan perlindungan terhadap benda cagar budaya.

9. Pengembangan Diri SDM Internal

Kegiatan pengembangan diri SDM di lingkungan Pusbang SDM Kebudayaan sudah dua kali digelar. Kegiatan bertajuk Pengembangan Diri dan Komunikasi Staf di tahun 2013 diikuti 40 pegawai, sedangkan tahun 2014 diikuti 50 pegawai.

Di tahun 2014, kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, pada tanggal 30-31 Januari 2014,, ini diisi dengan olahraga bersama, kesenian, penghargaan bagi pegawai yang memasuki purna bakti, paparan peningkatan kinerja pegawai, dan paparan program pengembangan SDM Kebudayaan 2014.

Menurut Kepala Pusbang SDM Kebudayaan Shabri Aliaman, melalui kegiatan santai itu diharapkan setiap pegawai mampu menyegarkan kondisi diri dan mampu menjalin hubungan kondusif antar pegawai, juga mampu meningkatkan pemahaman teknis mengenai pengelolaan kegiatan SDM kebudayaan.

Kegiatan juga meluncurkan slogan Pusbang SDM Kebudayaan yakni PRO2K2SDM, yang merupakan kependekan dari Profesional, Proaktif, Kebersamaan, Komunikatif, Saling Menguatkan, Disiplin, Melayani dengan sepenuh hati.



Dok. Pusbang SDM Kebudayaan

10. Penyusunan Naskah Kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Terobosan penting sepanjang kurun 2012-2014 yang sudah dicapai Pusbang SDM Kebudayaan terkait penyusunan regulasi adalah ditetapkannya Permendikbud Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan SDM Kebudayaan. Pedoman ini menjadi landasan dalam menyusun program dan kegiatan pengembangan SDM kebudayaan. Sejumlah naskah regulasi lainnya yang tengah disusun seperti tampak pada tabel.

NO	NASKAH KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA	TAHUN PENYUSUNAN	HASIL	KETERANGAN
1	PEDOMAN PENGEMBANGAN SDM KEBUDAYAAN	2013-2014	PERMENDIKBUD NO.52 TH.2014	
2	PENETAPAN JENIS PROFESI SDM KEBUDAYAAN	2013	DRAFT	
3	PEDOMAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SDM KEBUDAYAAN	2013	DRAFT	
4	STANDAR PENILAIAN KINERJA SDM KEBUDAYAAN BIDANG CAGAR BUDAYA	2013	DRAFT	
5	PEDOMAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI BAGI SDM KEBUDAYAAN	2013	DRAFT	
6	ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT	2013	DRAFT	
7	STANDAR KOMPETENSI UMUM DAN TEKNIS SDM KEBUDAYAAN	2015	OUTLINE	
8	PETUNJUK TEKNIS PERMENDIKBUD NO.52	2015	OUTLINE	

11. Gerakan Nasional Pembelajaran Berbasis Budaya di Sekolah

Di penghujung 2014, Pusbang SDM Kebudayaan menggagas program Gerakan Pembelajaran Berbasis Budaya di Sekolah. Program yang akan dicanangkan pada tahun 2015 ini merupakan tindak lanjut dari gagasan Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., Kepala BPSDMPK-PMP, yang disampaikan pada 19 November 2014.

Gagasan Syawal Gultom tersebut kemudian didiskusikan di lingkungan internal Pusbang SDM Kebudayaan untuk merumuskan kerangka awal dan merencanakan tim penyusun pedoman. Pembahasan



- Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta membuat kreasi modul ajar yang diberi judul "Pengembangan Bahan Ajar Materi Perbandingan Berupa Modul untuk Kelas IX di SMP Negeri 2 Bantul sebagai Identifikasi Etno Matematika dalam Konteks Sosial-Budaya pada Gamelan Yogyakarta".

berikutnya, Pusbang SDM Kebudayaan menggandeng sejumlah pihak untuk menyusun naskah akademik gerakan pembelajaran berbasis budaya di sekolah, pada pertemuan awal Desember. Mereka adalah Prof. Dr. S. Hamid Hasan (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung), Dr. Agus Mulyana (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung), Dr. I Made Alit Mariana (LPMP Bali), Dr. Sediono, M.Si (P4TK Bidang IPA, Bandung), Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd (Kapuslitbangbud), Drs. Zulfikri Anas, M.Pd (Puskurbuk), dan Ramah Handoko, S.Sn (Universitas Negeri Jakarta).

Tahapan kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan *focus group discussion* (FGD), penyusunan draft pedoman, kegiatan lokakarya, uji petik, tahap finalisasi, dan penetapan panduan. Sebelum penganjangan gerakan, Pusbang SDM Kebudayaan akan melakukan kegiatan sosialisasi.





PEMBELAJARAN BERBASIS BUDAYA DILAKUKAN MELALUI PENDIDIKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DAERAH SETEMPAT YANG MENJADI DASAR BUDAYA.



Gerakan Pembelajaran Berbasis Budaya di Sekolah ini dilatarbelakangi kondisi kurang menggembirakan di sejumlah sekolah. Di antaranya, maraknya kekerasan (*bulllying*), tawuran antarsiswa, tindak asusila, dan semakin menipisnya sikap-sikap keluhuran budi pekerti, seperti tidak jujur, tidak suka menolong, lunturnya toleransi, kerjasama dan gotong royong.

Di sekolah juga merebak sikap permisif atau budaya yang diizinkan, hal yang melanggar norma menjadi diperbolehkan, serta hal yang dianggap tabu menjadi tidak tabu lagi. Misalnya, “budaya” menyontek yang sudah menjadi penyakit sosial dan kini berkembang ke arah yang lebih serius.

Pembelajaran berbasis budaya dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai kearifan lokal daerah setempat yang menjadi dasar budaya. Kearifan lokal daerah yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu pembelajaran berbasis budaya pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup/ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.

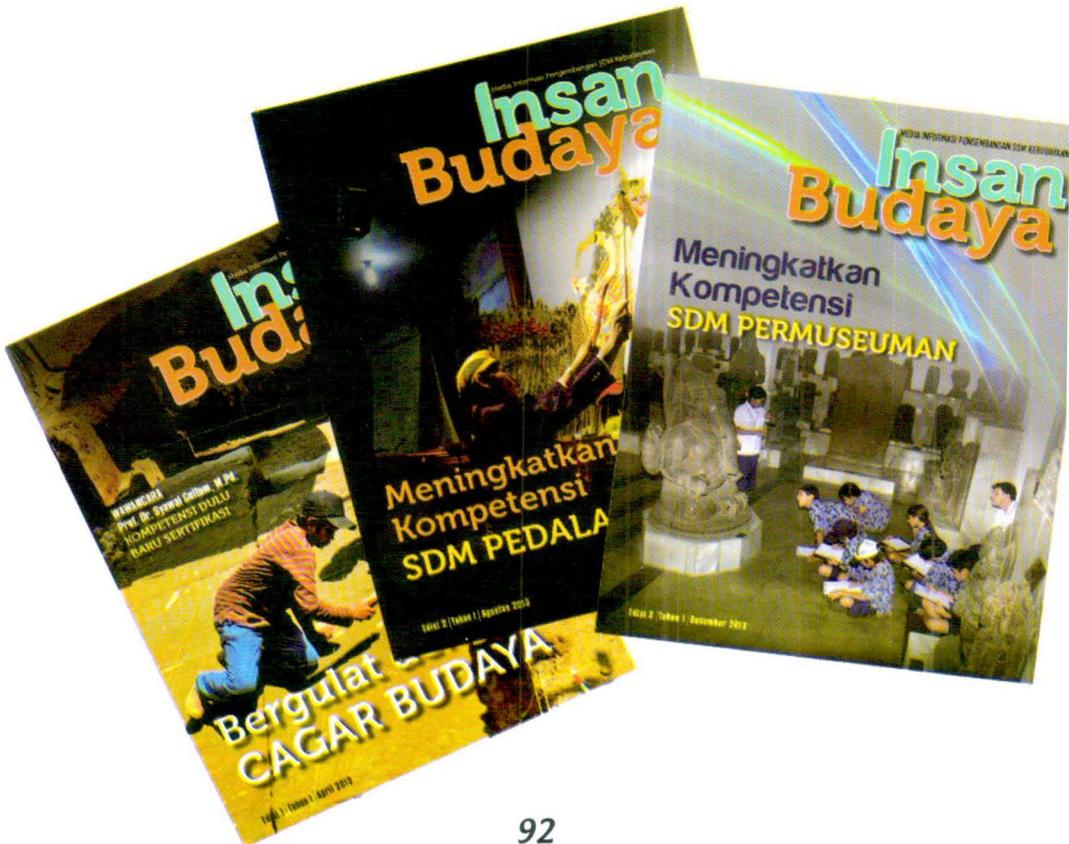
Pembelajaran berbasis budaya berfungsi sebagai perluasan pengembangan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang mendasari kehidupan budaya. Pembelajaran berbasis budaya diharapkan juga akan memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan nilai-nilai budaya di sekolah; serta menjadi wahana dalam mengembangkan potensi kemanusiaan peserta didik sebagai individu, anggota masyarakat, dan warga negara.

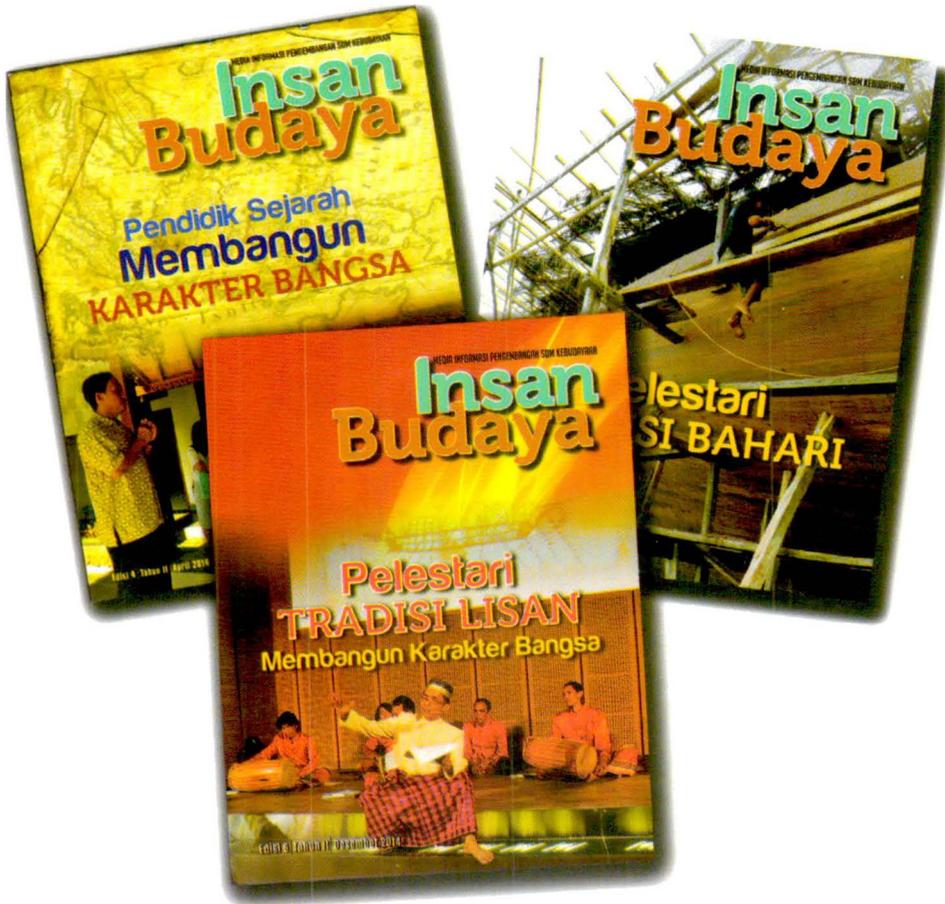
Perlunya gerakan pembelajaran berbasis budaya juga dimaksudkan untuk melengkapi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya, agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya serta tanggap terhadap perkembangan dunia.

Panduan Gerakan Pembelajaran Berbasis Budaya di Sekolah, di antaranya, memuat latar belakang, tujuan, substansi materi kebudayaan, penerapan gerakan pembelajaran berbasis budaya di sekolah, serta strategi penyusunan dalam kurikulum. Buku panduan tersebut meliputi Panduan Umum, Panduan Teknis Pelaksanaan, dan Panduan Teknis Evaluasi.

12. Publikasi Majalah, Buku, dan Modul Pengembangan SDM Kebudayaan

April 2013 menjadi catatan sejarah bagi Pusbang SDM Kebudayaan, yang berhasil menerbitkan majalah sebagai bentuk eksistensi dan sosialisasi sekaligus pencitraan lembaga. Pilihan nama *Insan Budaya* disepakati dari hasil diskusi santai yang digelar beberapa kali, sejak akhir tahun 2012. Nama bersahaja ini sangat sesuai dengan tugas dan fungsi Pusbang SDM Kebudayaan.





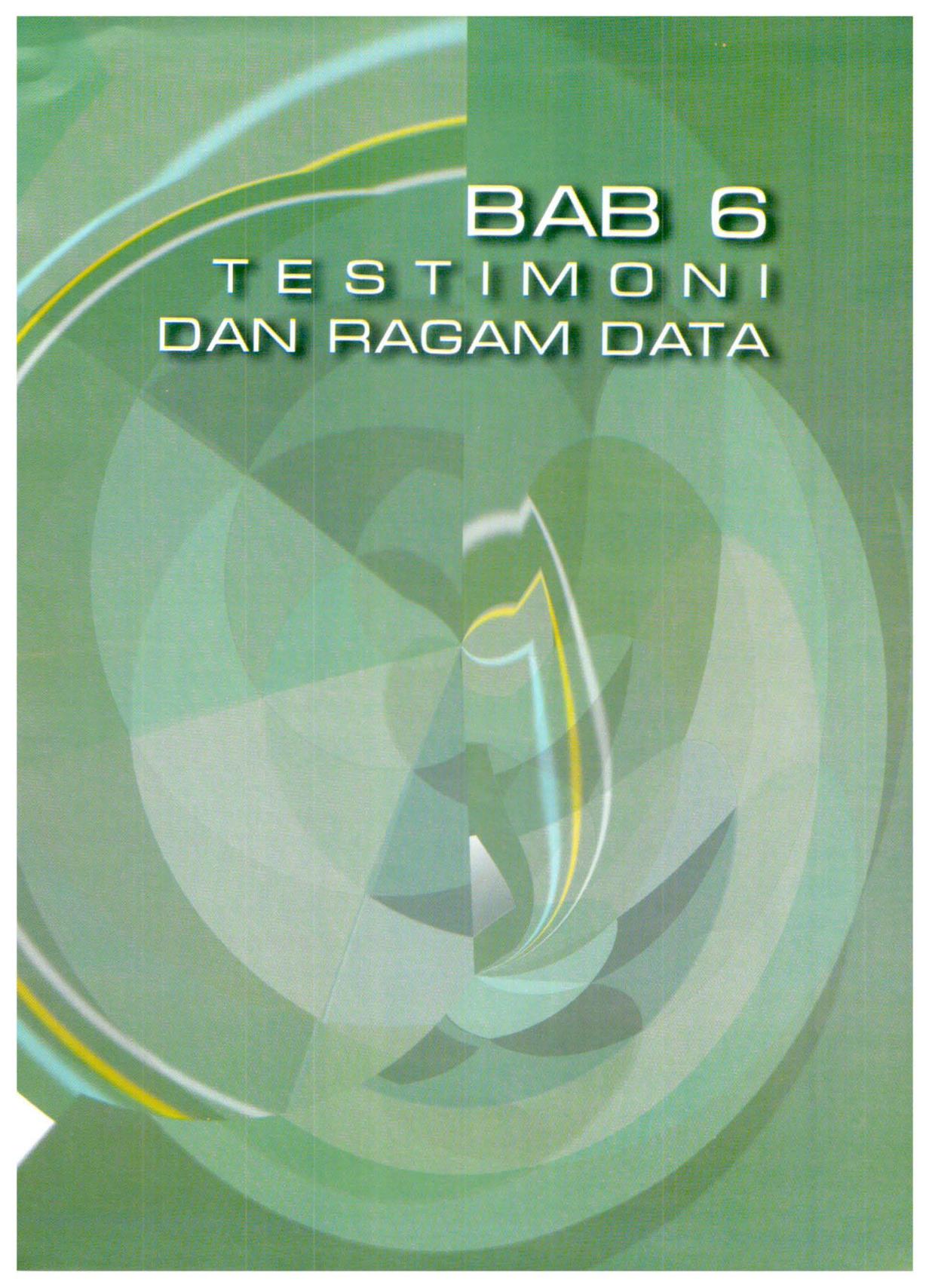
Penerbitan Majalah Insan Budaya dapat rutin dilaksanakan pada kurun 2013-2014 ini. Setiap edisi penerbitan selalu didahului rapat perencanaan redaksi, yang kemudian disusul rapat monitoring keredaksian. Sebelum masuk cetak, dummy majalah dibahas kembali dalam rapat akhir redaksi. Hingga akhir 2014 ini telah terbit 6 edisi.

Pusbang SDM Kebudayaan juga sudah menerbitkan buku *Profil SDM Kebudayaan* (2012), *Pedoman Inventarisasi Data Sumberdaya Manusia Kebudayaan (SDM Kebudayaan) Tahun 2014* serta 9 buah modul peningkatan kompetensi, yakni Museum dan Pendidikan, Modul Peningkatan Kompetensi Pemandu Museum (2013), Modul Publikasi dan



Kehumasan Penyelenggaraan Seni (2014), Manajemen Pemanduan Museum (2013), Modul Apresiasi Seni (2014), Komunikasi Pemasaran (2014), Modul Pemeliharaan dan Perawatan Koleksi Museum (2014), Modul Dasar-Dasar Konservasi Koleksi Museum (2014), Modul Prinsip Penyajian Museum (2014), dan Modul Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya (2014). ■



The background features a complex, abstract design in shades of green and blue. It consists of overlapping, semi-transparent geometric shapes, including circles and polygons, creating a layered, 3D effect. A prominent feature is a central, flame-like or teardrop-shaped element that appears to be composed of multiple overlapping layers, giving it a sense of depth and movement. The overall aesthetic is modern and digital.

BAB 6
TESTIMONI
DAN RAGAM DATA



SAYA berharap Pusbang SDM Kebudayaan lebih detail lagi dalam mengklasifikasikan jenis SDM kebudayaan. Setiap jenis tersebut memiliki standar yang berbeda satu sama lain. Soal kompetensi tenaga kebudayaan, sudah tentu kita akan bertemu pada keanekaragaman keahlian yang ada di bidang kebudayaan. Lalu ada keanekaragaman peranan. Ada yang berperan sebagai penggerak, ada yang mempunyai peranan sebagai pelaku, dan ada peneliti. Saya kira itu harus dibedakan ketika mendefinisikan jenis tenaga kebudayaan.



Prof. Dr. Edi Sedyawati
Mantan Dirjen Kebudayaan (1993-1999),
Guru Besar Fakultas Sastra UI Jakarta,

PADA era Dirjen Kebudayaan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra (1968-1978), beliau adalah peletak dasar pembangunan kebudayaan, termasuk pembangunan SDM kebudayaan. Ketika itu sudah mulai ada penataran, bimbingan dan penyuluhan, yang dilakukan oleh Bagian Kepegawaian Setditjen.

Saya sejak di Bagian Perencanaan Setditjen Kebudayaan sudah pernah mengusulkan adanya semacam Pusdiklat untuk SDM bidang kebudayaan. Sekarang ini, dibentuknya Pusbang SDM Kebudayaan sudah bagus dan mestinya juga didukung Pusdiklat untuk SDM Kebudayaan.



Nunus Supardi
Wakil Lembaga Sensor Film,
Mantan Sekretaris Ditjen Kebudayaan (1993-1999)



SEHARUSNYA setiap kementerian menggunakan falsafat kebudayaan karena semuanya menyangkut budaya. Contohnya di Kementerian Maritim, siapa yang sadar bahwa maritim itu tidak bisa dikembangkan tanpa budaya maritim itu sendiri.

Kebudayaan harusnya juga terinternalisasi dalam pendidikan. Misalnya ketika guru memberi materi matematika jarang menyangkut dengan matematika tradisional yang sudah ada di masyarakat tradisi.

Seharusnya setiap orang punya kesadaran bahwa kebudayaan harus menjadi pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah dan bencana-bencana yang terjadi sekarang ini. Sebab dengan apa yang saya teliti, bencana yang ada sumbernya dari bencana budaya.

SOAL sertifikasi, bagi dalang khususnya, diperlukan agar dalang yang tampil memiliki standar kualitas maupun penampilan. Dalang-dalang anggota Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) dapat dijadikan indikator seorang dalang punya kompetensi dan layak pentas.

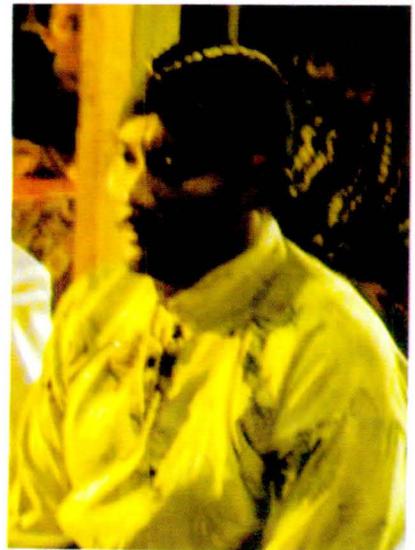
Bagi saya sendiri, wayang dan mendalang itu tetap nomor satu, nomor duanya mengajar. Kepuasan mendalang itu di hati. Meski upah mendalang tidak banyak sekali pun, dengan mendalang itu *bebasan wis ngrasakke mlebu swarganing kasampurnan* (ibarat merasakan memasuki kesempurnaan surga).



Prof. Dr. Kasidi Hadiprayitno, S.Kar., M.Hum
Dalang Wayang Kulit
Guru Besar Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Pudentia MPSS
Ketua Asosiasi Tradisi Lisan
Guru Besar Universitas Indonesia Jakarta





“ MENURUT saya kegiatan-kegiatan pelatihan seperti Peningkatan Kompetensi Kebudayaan bagi Guru Seni Budaya yang diselenggarakan Pusbang SDM Kebudayaan sangat bermanfaat. Meski saya sering sekali mengikuti pelatihan. Namun di setiap pelatihan kita dituntut bagaimana menerapkannya ke siswa.

Mengajarkan seni budaya berbeda dengan pelajaran sains atau bahasa. Seni memang butuh bakat. Namun di luar bakat, seni dan budaya setidaknya dapat membentuk sikap siswa. Seni itu identik keindahan, maka siswa pun dalam kesehariannya harus memperhatikan keindahan, kerapian pakaiannya, dandanannya.

Bambang Sedyanto, S.Pd.
Guru SMP Negeri 17 Kota Cirebon, Jawa Barat



KAMI sangat-sangat bersyukur, ada pegawai museum kami mendapat kesempatan mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan Pusbang SDM Kebudayaan.

Pengelola Museum Tani Jawa boleh dibilang memang belum profesional. Kompetensi sebagai pengelola museum juga masih kurang. Semoga ke depan kegiatan peningkatan kompetensi buat SDM permuseman diadakan Pusbang SDM Kebudayaan. Dan harapannya, pegawai kami juga tetap mendapat pelatihan tingkat lanjut.

Kristya Bintara
Pendiri dan pengelola Museum Tani Jawa, Bantul, DI Yogyakarta

TESTIMONI DAN RAGAM DATA

SAYA bersyukur sudah ada yang fokus menangani SDM kebudayaan. Bagus sudah ada Pusbang SDM Kebudayaan.

Saya sendiri sudah sangat senang bisa mengajar murid-murid belajar Gandrang Gendang dan menari. Saya punya sanggar, siapa pun boleh datang ke mari. Sehingga tidak harus saya mengajar sebagai guru atau dosen tamu. Sumur tidak akan pernah mencari timbanya, tetapi timba itulah yang akan mendatangi sumur untuk mengambil airnya. Sedalam apapun sumur itu jika memerlukan air, maka timba akan masuk ke dalamnya.



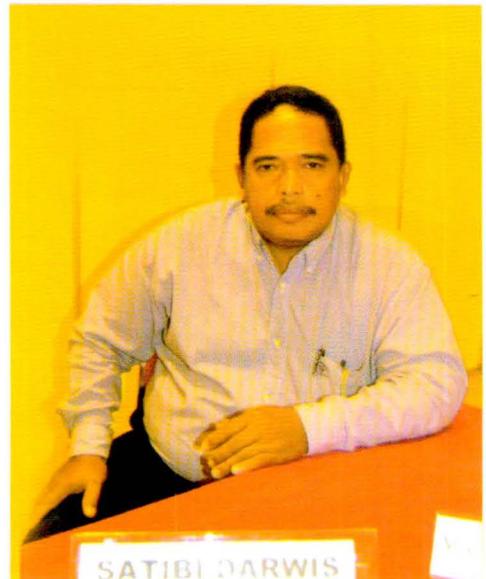
Daeng Sakko
Seniman Pertunjukan Tradisional Bugis Makassar
Peraih Maestro Seni Tahun 2007

SAYA senang jika banyak pengunjung museum, khususnya siswa. Meskipun saya di bagian koleksi namun saya dekat dengan masyarakat pengunjung karena saya sering bercakap-cakap dengan mereka.

Siswa juga harus tahu koleksi museum. Saya yang setiap hari bergaul dengan koleksi museum, lama-lama sangat mengenal semua koleksi museum. Saya bisa bilang pekerjaan paling mengasyikkan adalah di museum. Bekerja sambil rekreasi. Santai. Tidak tegang. Semoga banyak siswa nanti akan menyukai museum dan SDM kebudayaan lain, khususnya SDM permuseuman.



Satibi Darwis
Bagian Koleksi Museum Perjuangan Rakyat Jambi

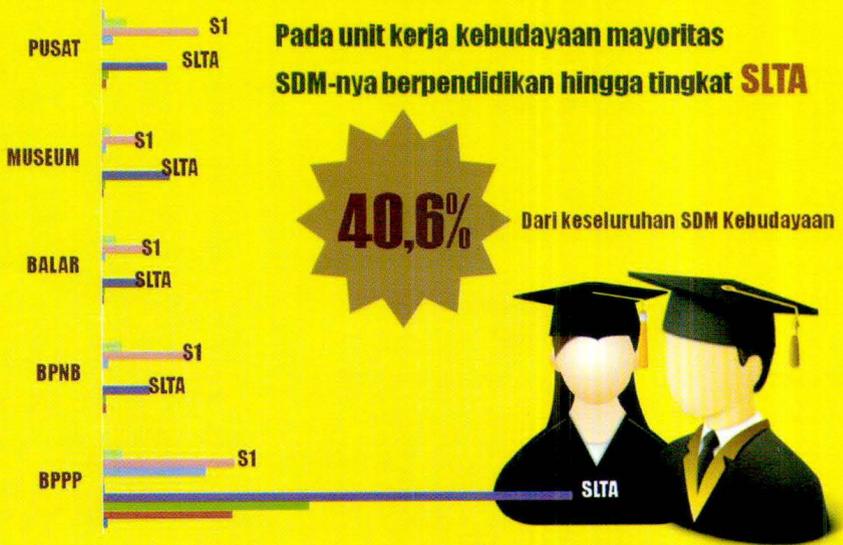


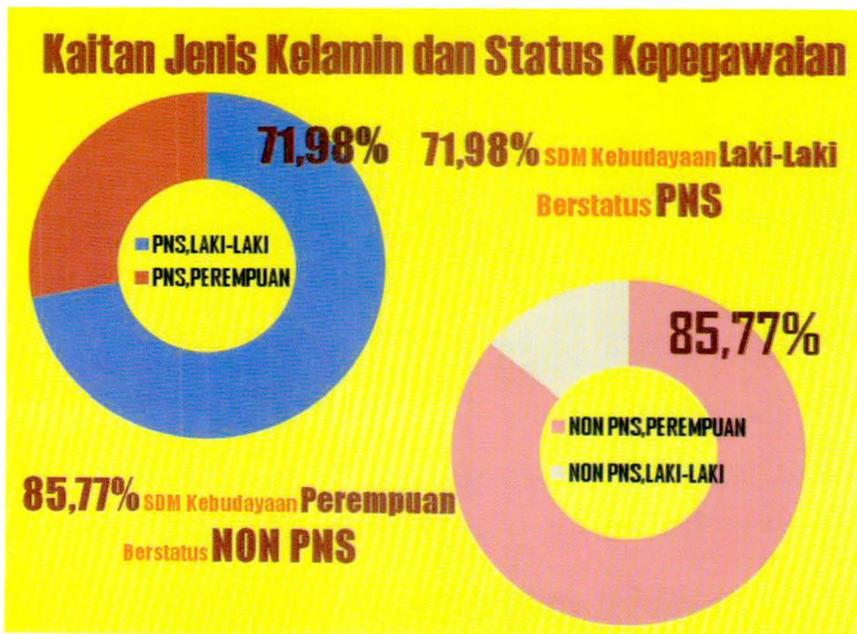
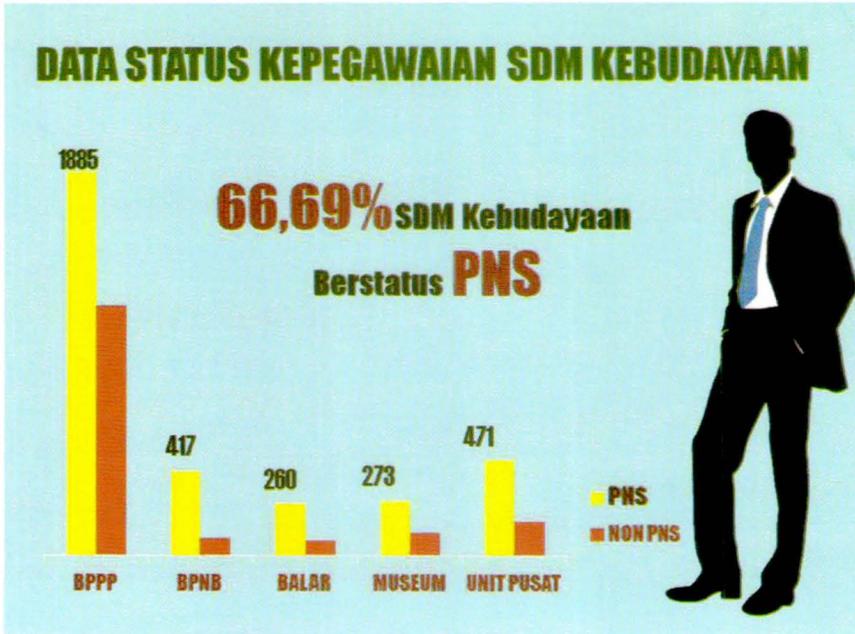
DATA JENIS KELAMIN SDM KEBUDAYAAN



MAJORITAS SDM KEBUDAYAAN ADALAH **LAKI-LAKI (76,8%)**

DATA TINGKAT PENDIDIKAN SDM KEBUDAYAAN



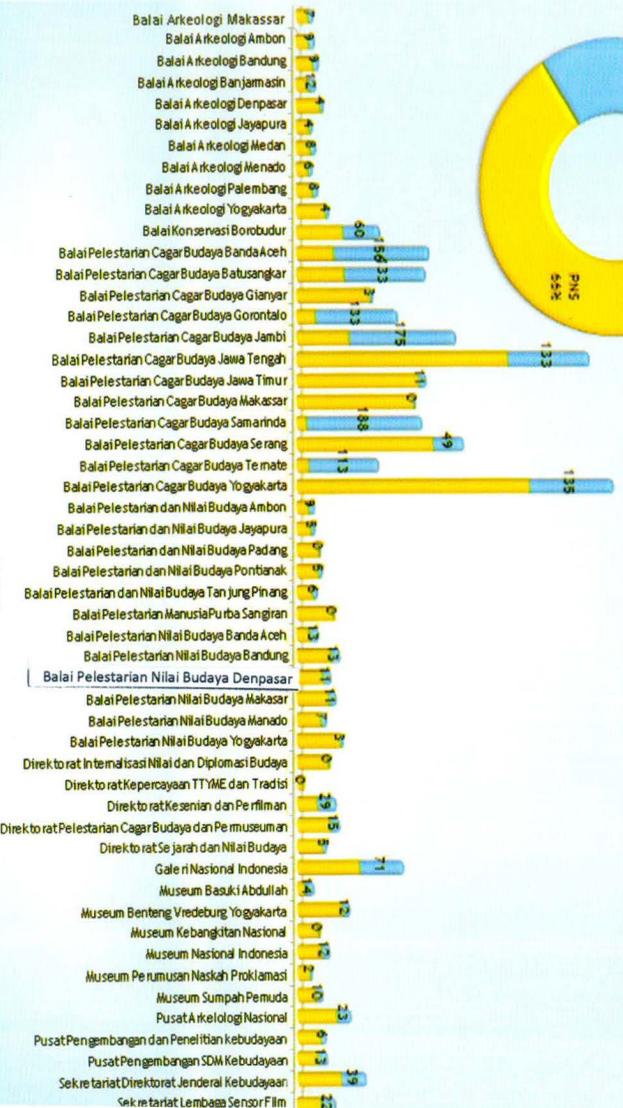


Kaitan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawain

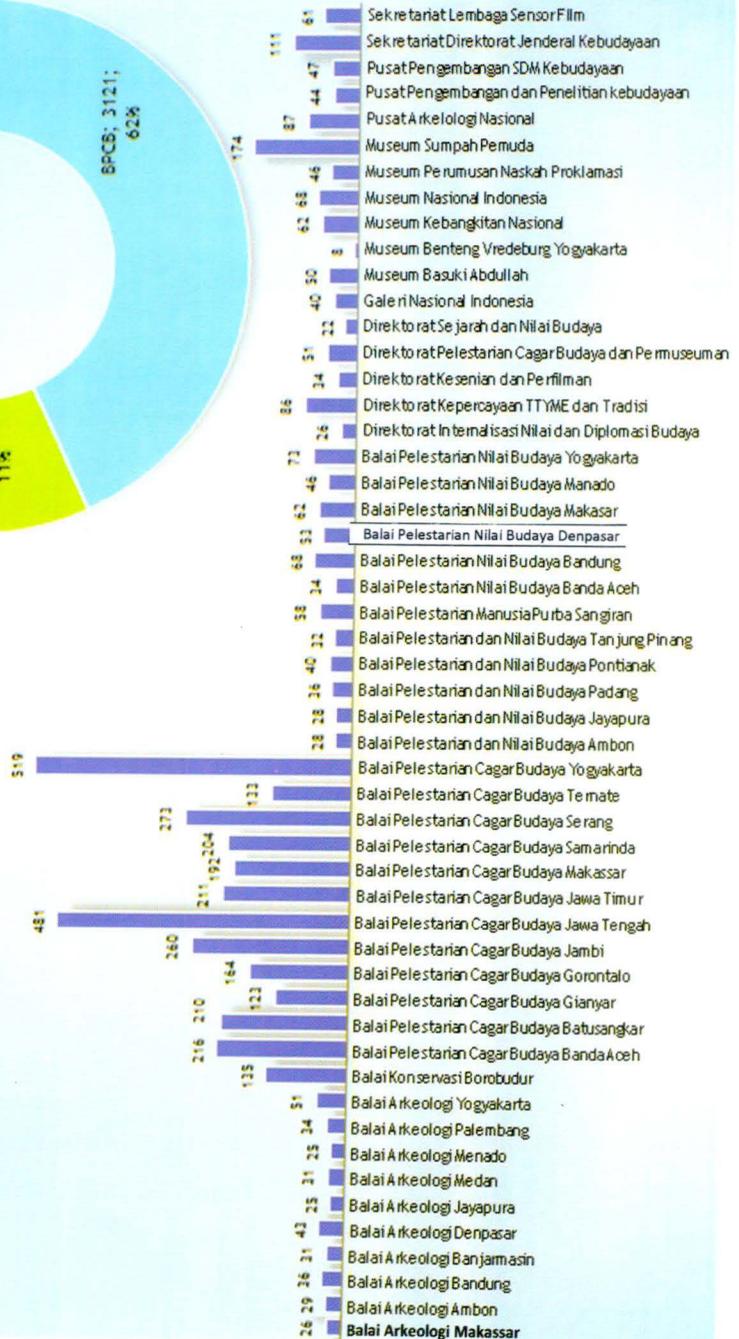
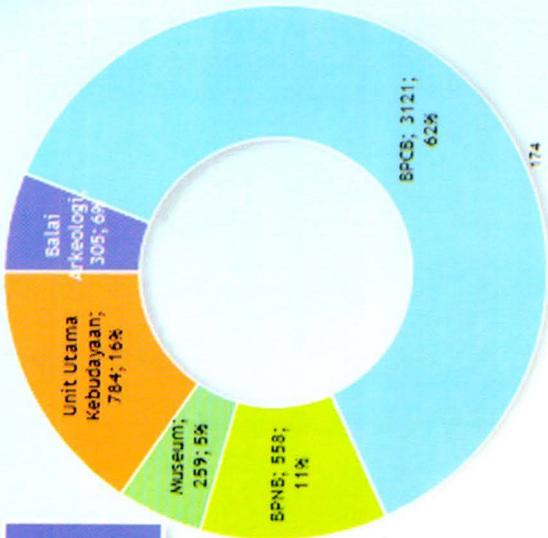


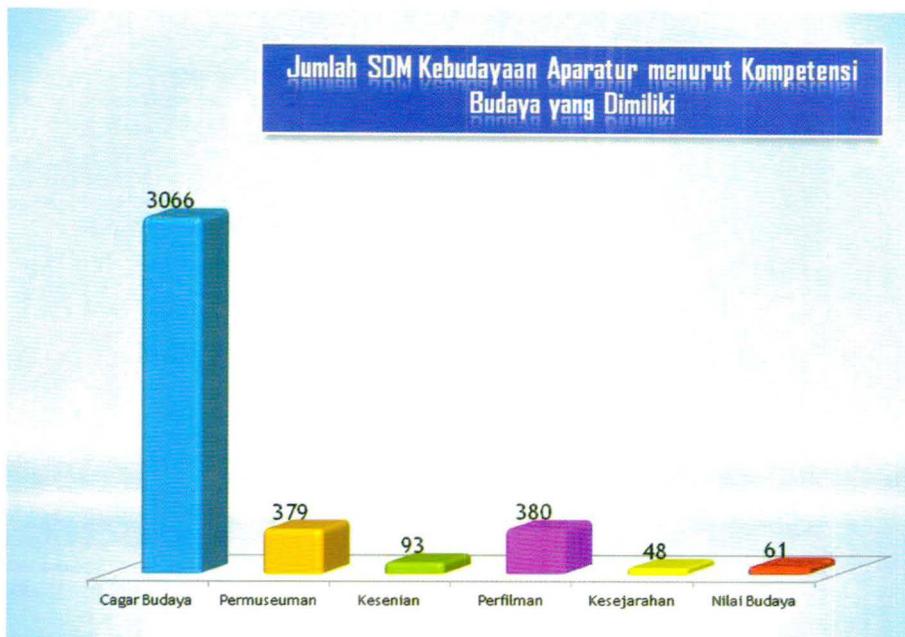
BAB 6

Jumlah SDM Kebudayaan Aparatur Pusa Menurut Status Kepegawain

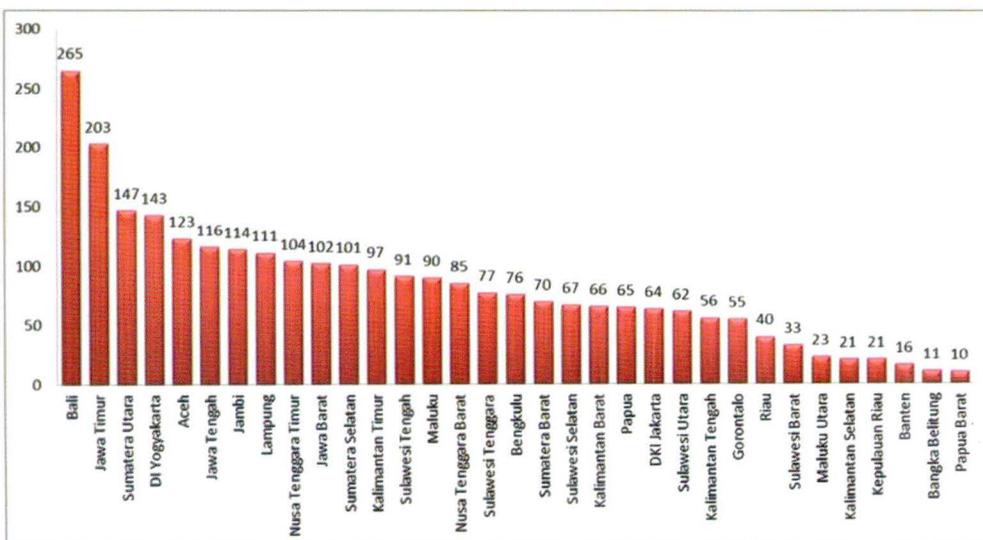


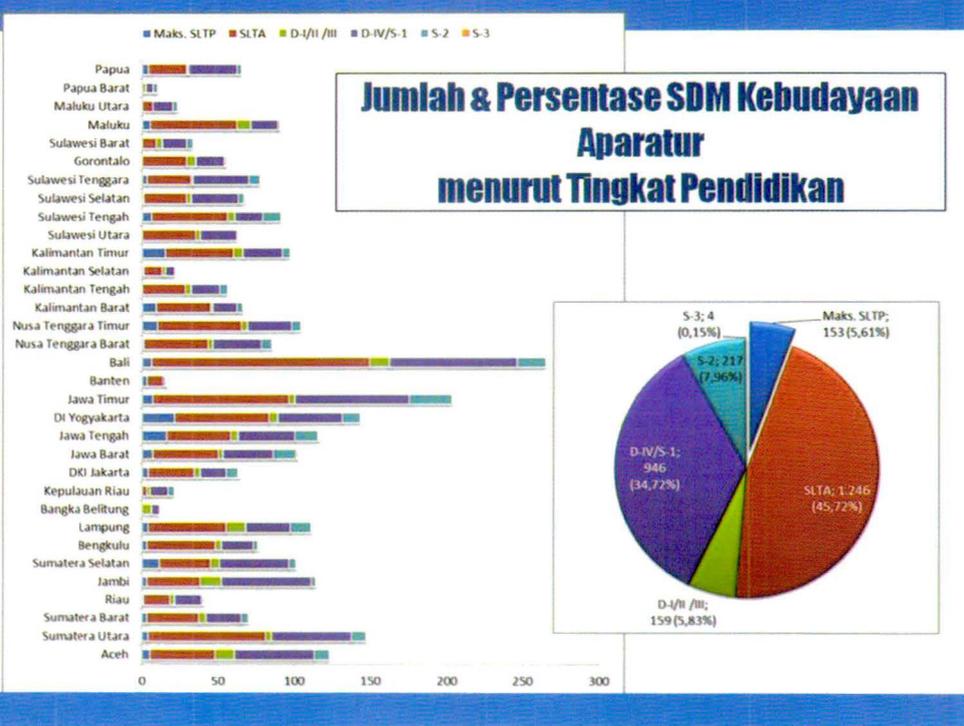
**Jumlah SDM Kebudayaan di
52 UPT Kebudayaan (Aparatur Pusat)**



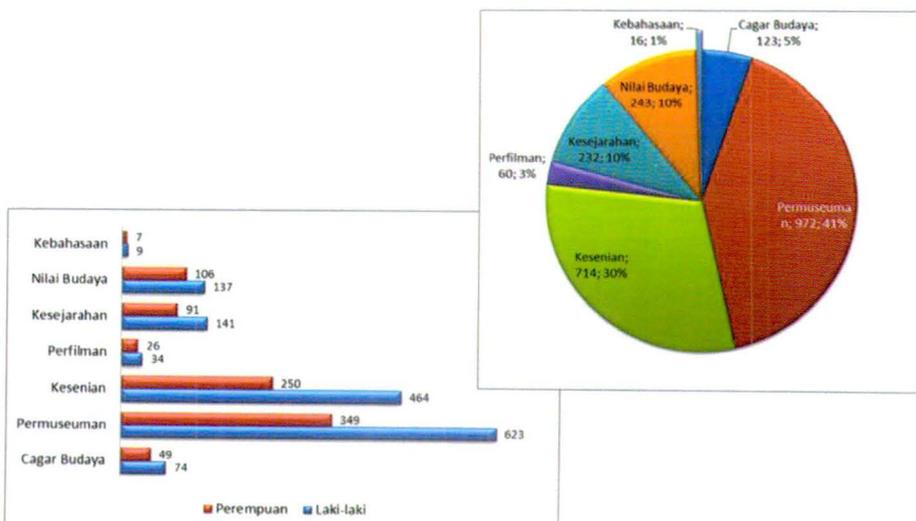


Sebaran Jumlah SDM Kebudayaan Aparatur menurut Provinsi

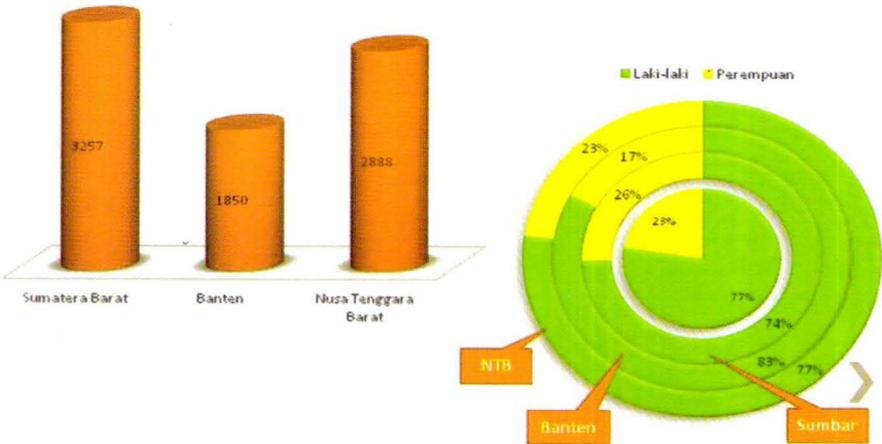




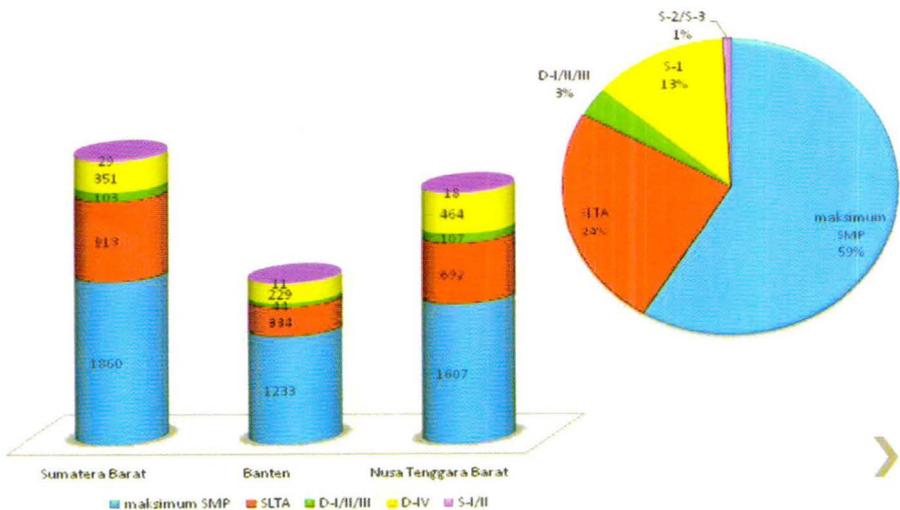
Jumlah & Persentase SDM Kebudayaan aparatur menurut Kompetensi/Bidang Budaya yg Dimiliki dan Jenis Kelamin



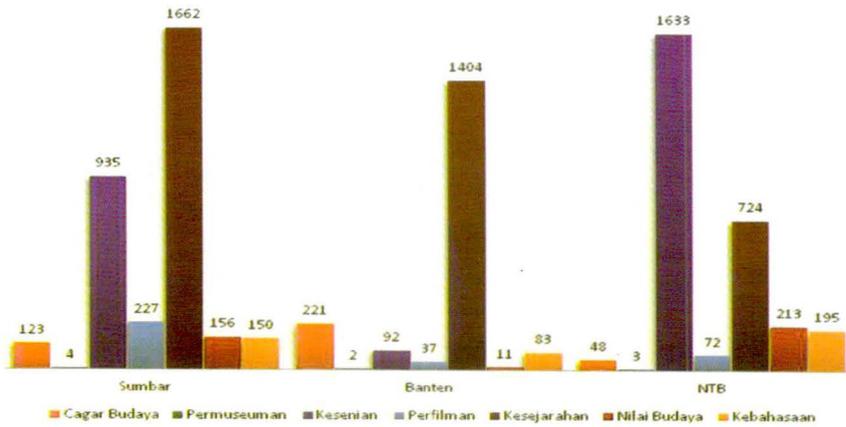
Jumlah & Proporsi SDM Kebudayaan di Provinsi NTB, Sumbar, dan Banten Berdasarkan Jenis Kelamin



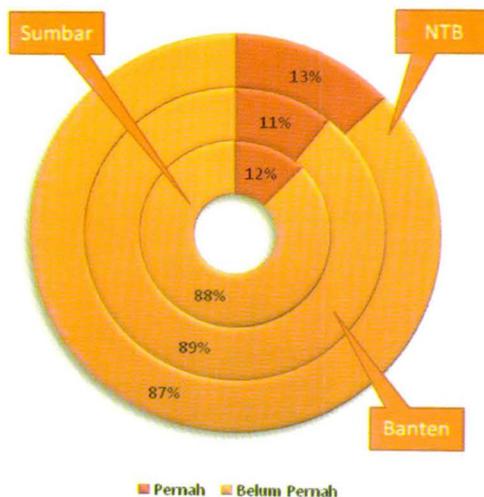
Jumlah SDM Kebudayaan di Provinsi NTB, Sumbar, dan Banten Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Jumlah SDM Kebudayaan di Provinsi NTB, Sumbar, dan Banten Berdasarkan Kompetensi/Bidang Budaya



Jumlah SDM Kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat, Banten, dan NTB Berdasarkan Pengalaman Keikutsertaan Diklat/Bimtek/Seminar/Kursus/Workshop





**Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan
Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu P
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Kompleks Kemdikbud Gedung E, Lantai 6
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat - 10270
Telp. (021) 5725704, Faks. (021) 5725519,
Email: pusbangsdmkebudayaan@kemdikbud.go
Situs web: www.sdmkebudayaan.com

Perpustakaan
Jenderal